

Strategi  
Perlindungan & Pembinaan  
**Bahasa Pagu**

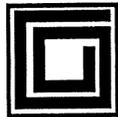


# Strategi Perlindungan & Pembinaan Bahasa Pagu

Oleh  
Muhamad Hisyam  
Azis Suganda  
Dalam Peranginangin



LIPI



PT Gading Inti Prima

## **Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Strategi Perlindungan & Pembinaan Bahasa Pagu/Muhamad Hisyam, Azis Suganda, Dalam Perangin-angin – Jakarta: 2014.

viii hlm. + 100 hlm.; 14,8 x 21 cm

**ISBN : 978-602-221-276-8**

1. Bahasa - Pagu

401.4

Penerbit:

**PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)**

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

## **KATA PENGANTAR**

**P**enelitian tentang bahasa-bahasa etnik minoritas di Indonesia bagian timur yang meliputi enam daerah penelitian (dua di Halmahera Utara, satu di Halmahera Barat, dua di Alor, dan satu di Maluku Barat Daya) telah dilaksanakan selama empat tahun, sejak 2011. Masing-masing menghasilkan satu buku tiap tahun. Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini adalah seri keempat tentang bahasa Pagu, yaitu bahasa etnik Pagu yang bermukim di sejumlah desa di beberapa kecamatan, di Kabupaten Halmahera Utara. Seri satu merupakan pengenalan masyarakat Pagu, budaya dan bahasanya. Seri kedua tentang vitalitas bahasa Pagu, seri ketiga membincang pemertahanan bahasa Pagu, dan seri keempat tentang kebijakan dan perencanaan bahasa Pagu.

Kebijakan dan perencanaan bahasa merupakan tahap sangat penting dalam proses pelestarian bahasa, terutama bahasa yang terancam punah seperti bahasa Pagu. Kebijakan bahasa dalam konteks pembangunan bahasa-bahasa daerah di Indonesia sudah dibuat oleh pemerintah pusat, berupa Undang-Undang Dasar, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam hal kebijakan bahasa di tingkat daerah, sumber-sumber hukum tersebut perlu dijabarkan lagi ke dalam kebijakan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab pada dasarnya tiap-tiap daerah memiliki kekhususan dan keunikan masing-masing yang memerlukan kebijakan lebih khusus.

Kebijakan bahasa, pada level apapun, baik pusat maupun daerah memerlukan pengandaran lebih lanjut supaya bisa dijalankan di tingkat masyarakat penutur bahasa. Operasionalisasi kebijakan bahasa di tingkat masyarakat itulah yang disebut dengan perencanaan bahasa. Secara teoretis perencanaan bahasa meliputi perencanaan corpus, perencanaan prabawa, perencanaan status, dan perencanaan pendidikan bahasa. Upaya perlindungan dan pelestarian bahasa membutuhkan dua aspek penting yang saling menunjang, yaitu kebijakan dan perencanaan bahasa. Kebijakan bahasa memberi arah,

dan perencanaan bahasa member isi terhadap upaya perlindungan dan pelestarian bahasa. Keduanya harus dirumuskan dengan cermat supaya dapat diterapkan dalam praktik di masyarakat. Buku ini memaparkan temuan-temuan lapangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Halmahera Utara dan masyarakat Pagu dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Pagu.

Kiranya perlu disoroti bahwa perencanaan pendidikan bahasa daerah Pagu dipandang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan pelestarian bahasa Pagu yang sudah terancam punah itu sulit dilaksanakan pada level rumah tangga dan masyarakat, karena pada level ini control tidak dapat dilakukan. Tidak berarti pada kedua level ini tidak perlu, tetapi melalui pendidikan formal di sekolah, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah, pelestarian dapat direncanakan dan dikontrol sekaligus. Kurikulum disusun, bahan ajar dibuat, pembelajaran dipraktikkan, dan evaluasi dilakukan, hanya mungkin dijalankan dalam proses pendidikan formal. Karena itu pemerintah Halmahera Utara dan masyarakat meyakini bahwa pelestarian bahasa daerah yang paling efektif adalah melalui pendidikan formal. Sebagai dampak positif dari kegiatan penelitian ini, selain masyarakat penutur bahasa daerah, semakin menyadari pentingnya pelestarian bahasa, juga secara formal pemerintah daerah menetapkan bahasa-bahasa daerah di Halmahera Utara, mulai tahun ajaran 2015 dijadikan mata ajar di semua tingkatan sekolah, dari tingkat dasar sampai menengah atas, sebagai muatan lokal.

Semoga kehadiran buku ini selain berfungsi sebagai dokumentasi bahasa dan permasalahan pelestariannya, juga diharapkan menggugah minat *stakeholders* untuk memulai berdaya upaya mempertahankan bahasa daerah, bukan saja bahasa Pagu, tetapi bahasa-bahasa etnik minoritas lainnya yang terancam punah.

Sampai dalam bentuk seperti ini banyak pihak telah membantu. Pemerintah daerah Halmahera Utara dan pemerintah Kecamatan Malifut banyak berkontribusi bagi tersusunnya buku ini. Para pemuka

masyarakat Pagu, terutama kepala suku Pagu atau sangaji, Ibu Afrida Erna Ngato sangat berjasa atas tersusunnya buku ini. Penghargaan yang tinggi dialamatkan kepada mereka, dan ucapan terimakasih memang tidak cukup, tetapi ini adalah satu-satunya cara yang dapat kami lakukan. Tegur sapa dan kritik sangat kami hargai untuk perbaikan buku ini. Terimakasih.

Jakarta, Desember 2014

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

**Dr. Endang Turmudi, MA**



## **PENGANTAR PENERBIT**

**P**ara pemerhati bahasa mengkhawatirkan kelestarian bahasa daerah karena semakin berkurang penuturnya. Kekhawatiran ini senada dengan perkiraan UNESCO bahwa pada abad ke-21 ini separuh dari enam ribu bahasa yang ada di dunia ini terancam punah (Tempo, 21 Februari 2007). Dari 6 ribu bahasa yang sudah diketahui saat ini, 61%nya merupakan bahasa yang digunakan di kawasan Asia Pasifik dan 726 lebih di antaranya dipakai di wilayah Indonesia. Menurut data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia, tetapi bahasa-bahasa tersebut terbagi diantara penduduk dunia secara tidak merata. Lebih dari 90% penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar hanya menggunakan sekitar 300 bahasa saja, di antaranya Bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol dan Inggris. Bahasa-bahasa tersebut sering disebut sebagai bahasa mayoritas. Kurang dari 10% dari total penduduk dunia berbicara dengan menggunakan sisanya yaitu 5.700 bahasa sebagai bahasa minoritas. Dari semua bahasa minoritas ini, 3.481 (61%) ditemukan di Kawasan Asia dan Pasifik. *Summer Institute of Linguistic* (SIL) dalam publikasi mutakhirnya (2006), menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa.

Tragisnya, kepunahan atau terancam punahnya bahasa-bahasa minoritas tersebut bukan karena bahasa itu lenyap dari lingkungan peradaban, melainkan para penutur meninggalkannya dan bergeser menggunakan bahasa lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi, sosial, politik, maupun psikologis. Kondisi seperti ini juga terjadi pada bahasa Pagu di Kabupaten Halmahera Utara yang pada saat ini berstatus sebagai terancam punah, karena para penuturnya lebih terbiasa menggunakan bahasa Melayu Ternate dan bahasa Indonesia. Fenomena yang terjadi pada bahasa Pagu ini berusaha dikaji oleh peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Identifikasi persoalan yang terdapat pada masyarakat Pagu terkait dengan kondisi bahasa Pagu dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap. Pada tahun 2011 dipaparkan dalam buku Bahasa dan Kebudayaan Pagu, pada tahun 2012 menghasilkan buku Vitalitas Bahasa Pagu, dan pada tahun 2013 menghasilkan buku Pemertahanan Bahasa Pagu, Kamus Sederhana Bahasa Pagu dan Film Dokumenter Masyarakat Pagu dan Budayanya yang sudah ditayangkan selama 3 (tiga) kali di MNCTV. Pada tahun 2014 ini, para peneliti LIPI berhasil menyusun buku Kebijakan dan Perencanaan Bahasa Pagu yang meliputi teori dan realitas yang terjadi pada suku Pagu.

Buku ini merupakan salah satu dari serangkaian terbitan hasil penelitian LIPI terhadap bahasa Pagu yang juga sajian cukup komprehensif tentang suku Pagu. Sandra Wimbish yang pernah melakukan penelitian tentang suku Pagu, hanya mencakup aspek linguistik saja, itupun terbatas hanya untuk kepentingan penyusunan thesis masternya. Oleh karena itu, buku ini perlu dibaca oleh para pemerhati bahasa etnis minoritas, khususnya yang berada pada Indonesia Timur.

Selamat membaca.

Bogor, Desember 2014

Penerbit,

**PT. Gading Inti Prima**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENGANTAR PENERBIT.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

## BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1. Pentingnya Perangkat Hukum yang Kuat .....	1
2. Menemukan Cara yang Jitu.....	4
3. Kebijakan dan Perencanaan Bahasa.....	5
4. Kerangka Kerja Penelitian .....	11
5. Sumber Informasi.....	13

## BAB II KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BAHASA PAGU ..... 17

1. Payung Hukum Tingkat Nasional .....	17
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri .....	20
3. Kebijakan dan Langkah-langkah Perlindungan Bahasa .....	27

## BAB III PERENCANAAN BAHASA ..... 41

1. Perencanaan Status dan Prabawa .....	41
2. Perencanaan Korpus.....	44
a. Rekaman Cerita Rakyat .....	45
b. Mantra .....	53
3. Perencanaan Pendidikan Bahasa .....	54
a. Respons Masyarakat Pagu .....	58
b. Masalah Metode Pembelajaran Bahasa Ibu .....	61
4. Semangat Kembali ke Bahasa Ibu dan Implementasinya.....	65
5. Pencapaian Terkini.....	67

6. Perencanaan Proyek 4 Tahun .....	71
-------------------------------------	----

BAB IV P E N U T U P .....	75
-------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN .....	79
------------------------------	----

Lampiran 1 : Bahan rapat Mulok Bahasa Daerah 14 Mei 2014  
di Tobelo

Lampiran 2 : Daftar rekaman yang dihasilkan sejak April 2012

---

---

# **BAB I**

---

---

## **PENDAHULUAN**

### **1. Pentingnya Perangkat Hukum yang Kuat**

**P**enelitian tentang Pemertahanan Bahasa Etnik Minoritas di Indonesia Bagian Timur sudah berlangsung sejak tahun 2011. Beberapa langkah telah dilakukan dan beberapa hasil antara lain telah diperoleh. Mulai dari pemetaan etnografis pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 identifikasi vitalitas bahasa dan sampai dengan tahun 2013, penelitian bahasa Pagu telah menghasilkan kesimpulan bahwa revitalisasi bahasa Pagu merupakan kebutuhan mendesak yang harus diupayakan dalam waktu dekat. Makin lambat usaha revitalisasi, semakin jauh kemerosotan Bahasa Pagu, sehingga semakin rumit dan kompleks pula upaya revitalisasinya.

Dari penelitian tahun 2013 antara lain disimpulkan bahwa revitalisasi dapat dilakukan dalam dua jalur, formal dan informal. Jalur formal adalah upaya-upaya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah dan sekolah yang secara sengaja dimaksudkan untuk merevitalisasi bahasa, sedangkan jalur informal adalah upaya-upaya yang berlangsung di dalam keluarga dan masyarakat penutur bahasa tanpa intervensi pemerintah. Masing-masing jalur memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri, tetapi dalam proses keduanya perlu berjalan secara serentak.

Untuk meningkatkan keberhasilan program revitalisasi bahasa, pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Halmahera Utara, perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kantor Bahasa, para akademisi di universitas/perguruan tinggi dan pemangku adat. Di samping itu, dukungan politik dari DPRD

juga harus dikuatkan, sehingga program-program terkait penyelamatan bahasa daerah yang terancam punah tidak menemui jalan buntu, karena tidak mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif.

Pemerintah daerah juga dituntut berinisiatif untuk mendorong masyarakat menghidupkan kembali bahasa daerah melalui jalur-jalur informal seperti mendirikan sanggar budaya sebagai wadah yang dapat menghimpun berbagai aspirasi dan kreativitas budaya masyarakat daerah, lomba pidato dalam bahasa daerah dan berbagai aktivitas lainnya.

Pada saat ini, revitalisasi Bahasa Pagu mendapat momentum yang tepat dengan adanya gerakan masyarakat adat yang gencar dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa masyarakat adat berhak atas pengelolaan hutan adat yang menjadi ulayatnya, mendorong kesadaran masyarakat adat Pagu untuk memperkuat identitas mereka. Untuk memperkuat identitas itu mereka menyadari pentingnya kejelasan budaya, bahasa, adat istiadat dan tradisi. Gerakan adat ini mendorong masyarakat Pagu merevitalisasi bahasa ibu mereka, bahasa Pagu adalah bagian dari upaya menguatkan identitas mereka.

Beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemda Halmahera Utara dan masyarakat Pagu sendiri untuk menghidupkan kembali bahasa Pagu, tetapi upaya-upaya tersebut masih bersifat sporadis, terlepas satu dengan yang lain, dan tidak berada dalam bingkai sistem yang jelas, sehingga sangat diragukan keajegan dan efektivitasnya. Ketentuan Undang-undang No. 24 tahun tahun 2009 yang menjadi payung hukum pembinaan bahasa daerah yang menjadi bagian dari pelestarian bahasa dan budaya Nusantara, implementasinya belum jelas. Belum ada peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah yang merupakan petunjuk

operasional bagi melaksanakan undang-undang tersebut. Sebenarnya sangat diperlukan regulasi yang lebih operasional untuk melaksanakan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 yang mencakup tujuan dan langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan. Tanpa peraturan pelaksanaan, undang-undang hanya akan menjadi retorika semantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur pelestarian budaya dan bahasa daerah yang terbit lebih awal dari Undang-Undang No. 24 tahun 2009, walaupun nampak searah, namun jelas bukan ditujukan untuk menindaklanjuti maksud Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa antar instansi pemerintah tidak terdapat koordinasi dalam menyusun kebijakan bahasa. Lagipula, peraturan pelaksanaan undang-undang itu tidak cukup hanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), karena perlu juga mendapat perhatian dan dukungan gerakan dari beberapa kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang tidak dapat diatur oleh Kemendagri.

Fenomena lain, Permendagri No. 40 tahun 2007 juga belum ditanggapi secara serius oleh instansi-instansi pemerintah di bawahnya. Di Kabupaten Halmahera Utara misalnya, sampai tahun 2013 tidak terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelestarian bahasa-bahasa dan budaya daerah. Fenomena ini disinyalir karena tidak dilakukannya pemantauan yang ajeg atau bisa jadi tidak dianggap serius oleh kemendagri sendiri. Artinya, peraturan tentang pelestarian bahasa dan budaya daerah perlu mendapat penguatan tekanan untuk implementasinya dengan membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pemantauannya.

Mengacu pada tema penelitian tahun 2014 ini (kebijakan dan perencanaan bahasa), maka diperlukan perangkat hukum yang kuat untuk menindaklanjuti Undang-undang No. 24 tahun 2009 yang mengatur sistem yang komprehensif bagi berbagai kegiatan revitalisasi bahasa, yang di dalamnya juga mengatur peran setiap komponen yang terlibat atau perlu terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah. Sistem yang diformulasikan perlu berpijak pada realitas yang ada dalam masyarakat, dan dengan mengambil manfaat dari teori-teori para *linguist* tentang *language policy* dan *language planning*.

## 2. Menemukan Cara yang Jitu

Bagaimana perlindungan dan pembinaan bahasa yang terancam punah dapat dilakukan, memerlukan kebijakan dan perencanaan bahasa yang kuat. Uraian di atas menunjukkan baik kebijakan maupun perencanaan bahasa belum dibuat secara sinergis oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Penelitian pada tahun 2014 difokuskan untuk mencari cara bagaimana pencegahan kepunahan bahasa Pagu yang pada saat ini, menurut kriteria *linguistic*, dalam status terancam punah. Secara teoretis cara tersebut dapat dimulai dengan penyusunan formulasi *language policy* dan *language planning* yang dapat diterapkan secara efektif ke dalam masyarakat penutur bahasa Pagu. Oleh karena itu, penelitian tahun 2014 berfokus pada dimensi eksternal bahasa Pagu sebagai *stakeholders* dan dipandang berkontribusi penting dalam upaya revitalisasi bahasa Pagu. *Language policy* perlu ditelusuri melalui regulasi formal (pemerintah) dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah. Sedangkan *language planning* ditelusuri melalui empat jenis planning, yaitu:

- (1) *Corpus planning* atau Perencanaan Korpus,
- (2) *Status Planning* atau Perencanaan Status,

- (3) Perencanaan Prabawa, dan
- (4) *Languages Education planning* atau Perencanaan Pendidikan Bahasa.

Di samping itu, pendokumentasian bahasa Pagu yang telah dimulai sejak awal penelitian ini (2011) tetap dilakukan, antara lain untuk melengkapi dan menyempurnakan kamus sederhana bahasa Pagu, menambah perbendaharaan cerita rakyat, dongeng, nyanyian dan peribahasa yang hidup di masyarakat.

Dengan cara tersebut diharapkan tujuan penelitian dapat dicapai, yaitu memformulasikan strategi revitalisasi bahasa Pagu melalui *language policy* dan *language planning* yang sinergis sebagai rekomendasi membuat kebijakan revitalisasi bahasa Pagu (*policy paper*). Tujuan lain, yakni memperkaya dokumen bahasa dapat dicapai dengan terus melakukan rekaman terhadap cerita rakyat, peribahasa, lagu-lagu daerah dan mantera-mantera. Pendokumentasian dilakukan dengan perekaman baik audio maupun audio-visual terhadap *event* budaya dan tradisi serta narasumber yang secara khusus diminta untuk bercerita.

### **3. Kebijakan dan Perencanaan Bahasa**

Sudah disinggung di atas, sejak tahun 2011 Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pendokumentasian bahasa Pagu dan lima bahasa etnik minoritas lain di Indonesia bagian timur. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan wujud dukungan pemerintah Republik Indonesia khususnya LIPI, terhadap bahasa-bahasa minoritas yang terancam punah di Indonesia. Setelah melakukan analisis bahasa dan keadaan sosiolinguistik serta pendokumentasian bahasa, tujuan akhir dari kegiatan ini adalah merumuskan rekomendasi kepada segenap pihak yang bersangkutan (*stakeholders*) untuk mendukung dan melaksanakan pemertahanan

bahasa-bahasa minoritas, terutama bahasa yang terancam punah ini.

Dukungan terhadap pemertahanan bahasa-bahasa minoritas yang terancam punah dapat diwujudkan dengan merumuskan “Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa” atau dalam istilah teknis linguistik-nya dikenal dengan *language policy and language planning*. Kegiatan penelitian tahun 2014 difokuskan pada kasus keterancaman kepunahan bahasa Pagu berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tahun 2014 ditambah dengan data hasil penelitian sebelumnya, sejak 2011 sampai 2013.

Berikut ini dikemukakan pengertian “Perencanaan dan Kebijakan Bahasa” disertai dengan beberapa contoh kasus pada bahasa-bahasa lain di dunia dan keberhasilan dan kendala pelaksanaannya.

“Perencanaan Bahasa” adalah sebuah upaya terencana yang berisikan ide-ide, undang-undang dan peraturan (Kebijakan Bahasa), yang ditujukan untuk mencapai sebuah perubahan (atau untuk menghentikan terjadinya perubahan) dalam ruang lingkup sebuah komunitas bahasa (Kaplan B., Robert, and Richard B. Baldauf Jr 1997: 3). Dengan kata yang lebih sederhana, perencanaan bahasa adalah kegiatan untuk memperbaiki perilaku kebahasaan sebuah komunitas bahasa. Kegiatan Perencanaan Bahasa biasanya dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan sosial, namun sering pula melibatkan beragam lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahkan perorangan.

Pada mulanya perencanaan dan kebijakan bahasa diadakan untuk tujuan menstandarisasi bahasa nasional bagi negara-negara yang baru merdeka/pasca era kolonialisme (Sallabank, 2011; Fishman, 1974; Rubin dan Jernudd, 1971). Sebagai contoh negara Republik Indonesia sejak berdirinya telah menjalankan

Perencanaan dan Kebijakan Bahasa yaitu dengan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi “bahasa negara adalah Bahasa Indonesia”. Pasal ini diterjemahkan sebagai bahasa yang wajib digunakan oleh setiap warga dan masyarakat Indonesia. Namun sayang pada pelaksanaannya untuk lebih ‘menjiwai’ penggunaan bahasa Indonesia banyak orang yang meninggalkan bahasa daerahnya, bahkan banyak kasus pelarangan oleh oknum tertentu terhadap orang lain, seperti misalnya guru melarang murid menggunakan bahasa daerahnya dan akan memberi hukuman kepada murid jika kedapatan melakukannya.<sup>1</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perencanaan dan Kebijakan Bahasa yang dijalankan Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil mewujudkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang mempersatukan semua latar-belakang linguistik masyarakat yang beragam. Namun sebagai konsekuensinya, banyak bahasa-bahasa daerah (minoritas) di Indonesia yang mengalami keterancamannya karena sudah ditinggalkan penuturnya.

Atas dasar ini, perlu kiranya pemerintah mengambil suatu tindakan untuk mencegah kepunahan bahasa-bahasa daerah/minoritas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan Perencanaan dan Kebijakan Bahasa yang sepenuhnya mendukung keberadaan dan keberlangsungan penggunaan bahasa-bahasa

---

<sup>1</sup>Menurut kesaksian sejumlah informan usia lanjut, di sekolah-sekolah Pagu dahulu (sekitar tahun 1950-60-an) guru mengharuskan anak didik berbicara dalam Bahasa Indonesia di sekolah, dan melarang anak didik berbicara dalam bahasa Pagu. Barang siapa melanggar, guru memberi sanksi antara lain: memakan kapur, berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung, atau bahkan memukul dengan kayu penggaris.

minoritas di samping tetap menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang mempersatukan ragam linguistik yang ada.

Perencanaan dan Kebijakan Bahasa yang dijalankan pada masa pasca-kolonial telah banyak menuai kritik dari para pemerhati keragaman bahasa dan bahasa-bahasa minoritas di antaranya Mühlhäusler (2000), Tollefson (1991) dan Williams (1992). Menurut mereka upaya pengenalan bahasa-bahasa nasional atau bahasa negara sebagai pemersatu dan pembangunan nasionalisme kerap mengorbankan keberadaan keragaman linguistik dan bahasa-bahasa minoritas. Semenjak tahun 1990an tumbuhlah minat negara-negara dunia terhadap kebijakan-kebijakan bahasa yang mendukung keragaman linguistik serta bahasa-bahasa minoritas yang terancam punah.

Dalam bagian ini dibahas Perencanaan dan Kebijakan Bahasa dalam pengertian dan tujuan yang terkini yaitu untuk mendukung keberadaan dan pengembangan bahasa-bahasa minoritas dan terancam punah.

Perencanaan Bahasa dan Kebijakan Bahasa dapat dibedakan berdasarkan ‘cakupan’ dan ‘arah kerjanya’ (Sallabank 2011). Cakupan (*scope*) didasarkan atas derajat strategi dan praktik-praktik yang terlibat, sedangkan arah kerja (*direction*) atas dasar ragam instansi atau perorangan siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan kedua dasar ini, maka batasan wilayah Perencanaan Bahasa dan Kebijakan Bahasa dapat direpresentasikan dalam tabel di bawah ini (Sumber: Sallabank 2011, hlm. 278)

**Tabel 1** Perbandingan Kebijakan dan Perencanaan Bahasa

	Cakupan ( <i>scope</i> )	Arah kerja ( <i>direction</i> )
Kebijakan ( <i>Policy</i> )	Kedudukan, prinsip, keputusan, strategi ( <i>positions, principles, decisions, strategy</i> )	Dari atas – ke bawah, kebijakan resmi terhadap bahasa-bahasa ( <i>top-down, official policy towards languages</i> )
Perencanaan ( <i>Planning</i> )	Tolok ukur nyata, pelaksanaan ( <i>concrete measures, practices</i> )	Dari bawah – ke atas, tolak ukur dasar untuk meyokong bahasa-bahasa ( <i>bottom-up, grassroots measures to support languages</i> )

Menurut Sallabank (2011) sedikitnya ada empat macam perencanaan yang dapat dilakukan dalam Perencanaan Bahasa, yaitu: (a) Perencanaan Korpus (*corpus planning*), (b) Perencanaan Status Bahasa (*status planning*), (c) Perencanaan Prabawa/ Gengsi (*prestige planning*) and (d) Perencanaan Pendidikan Bahasa (*language-in-education planning*).

a. Perencanaan Korpus

Yang tercakup di dalam Perencanaan Korpus diantaranya adalah pendokumentasian bahasa, standarisasi, modernisasi, dan pengembangan cara penulisan bahasa (*orthography*) serta pembuatan kamus, buku tata-bahasa dan bahan-bahan pengajaran bahasa.

Tujuan Perencanaan Korpus adalah untuk menanggulangi permasalahan permasalahan yang biasanya muncul pada penanganan bahasa-bahasa terancam punah, seperti misalnya:

- Bahasa-bahasa ini sering dianggap lebih rendah kedudukannya dan tidak mempunyai gengsi di masyarakat, oleh karenanya tidak dapat mengekspresikan pemikiran pada level yang lebih tinggi.
- Tidak memiliki buku tata-bahasa dan cara penulisan yang standar.
- Tidak memiliki kosakata yang sepadan untuk istilah-istilah teknologi dan singkatan.
- Tidak memiliki guru yang terlatih untuk mengajarkan bahasanya.

b. Perencanaan Status Bahasa

Perencanaan Status Bahasa mengarah pada upaya untuk memperoleh pengakuan resmi maupun secara politik terhadap bahasa tertentu. Salah satu isu yang dapat dimunculkan dalam perencanaan ini adalah dengan menentukan keragaman linguistik, misalnya apakah suatu bahasa perlu disebut sebagai ‘bahasa’ atau ‘dialek’ bahasa tertentu.

c. Perencanaan Prabawa/Gengsi Bahasa

Perencanaan ini diperkenalkan oleh Haarmann (1990) yang bertujuan untuk mempromosikan pandangan yang positif terhadap sebuah bahasa – baik itu dari segi politik maupun fungsinya. Perencanaan Prabawa Bahasa sangat penting dalam sebagai tolak ukur berhasilnya upaya revitalisasi sebuah bahasa. Perencanaan ini berhubungan erat dengan perilaku bahasa masyarakat.

#### d. Perencanaan Pendidikan Bahasa

Perencanaan Pendidikan Bahasa atau dikenal juga dengan Perencanaan Pemerolehan Bahasa (*Acquisition Planning*) ditujukan pada upaya untuk meningkatkan jumlah pengguna sebuah bahasa tertentu. Perencanaan untuk pembelajaran bahasa ini disarankan untuk melibatkan pendidikan formal di sekolah, karena pemerolehan bahasa di sekolah (tidak hanya di rumah tangga) akan meningkatkan status dan prabawa bahasa tersebut.

Dari segi Kebijakan Bahasa, kita dapat melihat bahwa pendekatan ini dengan sendirinya dapat berbentuk sebab (*cause*) dan juga akibat atau hasil (*product*) (Schiffman, 1996: 2-3). Sebagai contoh, keragaman bahasa adalah sebab dari keadaan kontak dengan banyak bahasa (*many language-contact situations*), dan dalam hal ini kebijakan dapat menghasilkan sesuatu, baik itu memaksimalkan keuntungan situasi keragaman bahasa ini ataupun mempromosikan penggunaan satu bahasa (atau beberapa bahasa tertentu saja). Kebijakan bahasa dapat mendasarkan tujuannya dengan kekuatan hukum yang mengikat, dengan upaya untuk mengontrol penggunaan bahasa tertentu (Spolski, 2004).

### 4. Kerangka Kerja Penelitian

Penelitian ini menelusuri dan mengkaji kebijakan bahasa yang ada di pemerintahan maupun masyarakat. Kebijakan bahasa ditelusuri melalui sumber-sumber pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Penelusuran itu mengenai peraturan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah dan seberapa jauh kebijakan tersebut diimplementasikan.

Perencanaan bahasa ditelusuri, seperti sudah disebut di muka, dengan membedakan empat aspek perencanaan bahasa,

yaitu: (1) Perencanaan Korpus, (2) Perencanaan Status, (3) Perencanaan Prabawa, dan (4) Perencanaan Pendidikan Bahasa. Adapun hasil dari keempat perencanaan ini dapat dibuat sebagai rujukan bagi institusi pemerintah, masyarakat maupun perorangan yang berwenang dalam pelaksanaan perencanaan bahasa.

Sambil mengumpulkan data tentang kebijakan dan perencanaan bahasa, perekaman juga dilakukan sepanjang penelitian lapangan tahun 2014. Perekaman-perekaman dikhususkan pada cerita rakyat, dongeng maupun sejarah.

Dalam praktiknya sejak 2011, sebenarnya tim Peneliti Bahasa Pagu telah menjalankan beberapa kegiatan yang terkait dengan perencanaan bahasa. Kegiatan yang terkait dengan korpus telah menghasilkan beberapa rekaman percakapan yang ditranskripsi dalam program ELAN dan *toolbox*. Pendokumentasian bahasa Pagu dilakukan dengan merekam lalu mengumpulkan beberapa bentuk (*genre*) bahasa seperti, cerita rakyat, lagu daerah, mantra, doa, dan peribahasa (Hisyam, dkk. 2012). Lebih lanjut dalam kegiatan ini tim peneliti juga telah menghasilkan sebuah kamus dalam tiga bahasa yaitu, Pagu-Indonesia-Inggris. Hasil pendokumentasian bahasa ini, seperti kamus dan kumpulan-kumpulan cerita rakyat serta peribahasa misalnya, dapat dijadikan materi bagi penyusunan bahan ajar dalam perencanaan pendidikan bahasa.

Yang terkait dengan status dan prabawa, keduanya juga sudah dimulai oleh tim dalam kegiatan lapangan di tahun 2011-2013. Dalam aspek status, tim peneliti Pagu telah mencoba melakukan analisis linguistik dan sosiologis tentang kedekatan bahasa Pagu dengan bahasa Kao. Walaupun secara linguistik perbandingan kedua bahasa amat dekat (misalnya, masing-masing penutur dapat mengerti satu sama lain) namun memiliki

perbedaan sosiologis (di antaranya perbedaan agama; Pagu mayoritasnya beragama Kristen, Kao beragama Islam). Dengan demikian, perbedaan bahasa Kao dan Pagu perlu difasilitasi sebagai bahasa yang menunjukkan jatidiri masing-masing pengguna bahasa tersebut.

Pada aspek prabawa di lain sisi, tim peneliti Pagu juga telah melakukan wawancara dan survei sikap bahasa pada masyarakat Pagu. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas orang Pagu merasa bangga dengan bahasa Pagunya (Hisyam dkk, 2011). Ditemukan bahwa hampir semua responden mengatakan bangga dengan bahasanya. Hal ini dapat dijadikan landasan positif bagi masyarakat untuk mempertahankan bahasanya sendiri.

Perencanaan pendidikan bahasa meliputi kegiatan penyiapan dan pematangan bahan ajar bahasa bagi anak-anak sekolah dasar, yang diambil dari bahan hasil kegiatan perencanaan korpus, seperti kamus, dan kumpulan peribahasa, lagu daerah dan doa. Lebih lanjut dipersiapkan pula para pengajar pelajaran bahasa Pagu, yaitu dengan melibatkan penutur Pagu yang berpengalaman dalam mengajar yang akan menjalani diklat metode mengajar dan pendalaman bahasa.

## **5. Sumber Informasi**

Untuk menyusun perencanaan bahasa Pagu, selain dipakai data-data dari penelitian terdahulu (2011-2013) juga dikumpulkan data-data baru, terutama yang berkaitan dengan aspirasi dan cara bagaimana bahasa Pagu akan dipertahankan agar tidak punah. Sumber data berasal dari pemerintah, masyarakat pendidikan, akademisi, lembaga legislatif, LSM misalnya AMAN, masyarakat etnis lain, dan tentu saja masyarakat Pagu sendiri. Data-data dikumpulkan dengan metode

wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) serta mempelajari dokumen terkait.

Pemerintah sebagai sumber data adalah Pemda tingkat Provinsi Maluku Utara, Litbangda Provinsi Maluku Utara, Pemda tingkat Kabupaten Halmahera Utara, masing-masing kantor Bappedanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, beberapa anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Halmahera Utara. Masyarakat etnis lain di sekitar Pagu yang perlu digali datanya adalah masyarakat Makian dan masyarakat Modole terutama melalui para tokohnya. Masyarakat Pagu yang diwawancarai selain Sangaji adalah kepala adat di beberapa desa Pagu, dan tokoh agama serta tokoh politik. Wawancara dengan akademisi dilakukan dengan beberapa dosen STKIP Kie Raha dan dosen etno-linguistik Universitas Sultan Khairun (UNKHAIR), keduanya di Ternate. Masyarakat pendidikan antara lain diwakili oleh beberapa guru yang telah mendapatkan pelatihan sebagai trainer (*training of trainers/TOT*) mengenai cara pengajaran atau metode pembelajaran bahasa daerah dan telah mempraktikkannya.

Pendokumentasian bahasa Pagu, seperti biasanya dilakukan dengan masyarakat penutur bahasa Pagu, dengan cara mencatat dan merekam percakapan naturalistik dan cerita/dongeng rakyat maupun percakapan atas permintaan peneliti, menggunakan alat perekam berupa kamera video dan tape recorder. Pengambilan gambar dengan kamera juga dilakukan pada peristiwa yang dianggap punya makna bagi penelitian ini. Nyanyian daerah juga direkam.

Rekaman-rekaman, baik wawancara, FGD, cerita rakyat maupun percakapan natural serta nyanyian daerah ditranskrip. Dalam hal rekaman berbahasa Pagu, transkripsi dilakukan

dengan bantuan penutur bahasa Pagu (*natives*). Catatan lapangan, baik hasil wawancara maupun FGD dianalisis dengan memperhatikan kemungkinan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan bahasa lebih lanjut yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat penutur bahasa Pagu. Yang terkait dengan penyusunan bahan ajar dikonsultasikan dengan pakar pedagogik.



---

---

## **BAB II**

---

---

# **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BAHASA PAGU**

### **1. Payung Hukum Tingkat Nasional**

**K**ebijakan Nasional tentang bahasa daerah bermula pada adanya kemauan politik Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32, yang berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional”. Ketentuan konstitusi tersebut paling tidak sudah dielaborasi dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga mengamankan penggunaan bahasa daerah, sebagai tercantum dalam Pasal 33, yang berbunyi “bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada awal pendidikan”. Selain itu, Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 42, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi “pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah”.

Dengan ketentuan yang terdapat pada konstitusi dan kedua undang-undang tersebut, sebenarnya dasar hukum yang menjadi pijakan untuk memberi perhatian besar terhadap pelestarian dan perlindungan bahasa daerah sudah sangat kuat. Bahkan tidak hanya sampai disitu, kalimat yang menyatakan “bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada awal pendidikan,” pada Pasal 33 Undang-undang 20 Tahun 2003, dan kalimat yang menyatakan “Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra

daerah” pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, harus dipahami sebagai adanya keharusan kepada pemerintah untuk melindungi, membina, dan mengembangkan atau menghidupkan bahasa daerah.

Namun nampaknya, ketentuan dalam konstitusi dan undang-undang tersebut belum memperoleh respon cukup dari kalangan pemerintah. Salah satu indikasi kelemahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak pernah dibuatkan petunjuk pelaksanaannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang biasanya mengatur tentang substansi, ataupun dalam bentuk Keputusan Presiden yang biasanya mengatur tentang operasionalisasi kerja, petunjuk teknis, dan pembagian tugas institusi pelaksana undang-undang. Dengan kondisi seperti itu, maka implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian dan perlindungan bahasa daerah di kalangan masyarakat menjadi tidak jelas. Secara substansial, tidak jelas materi apa saja yang menyangkut pelestarian dan perlindungan bahasa daerah. Secara institusional, juga tidak jelas instansi mana yang terlibat dan instansi mana yang paling bertanggung jawab terhadap implementasi peraturan tentang pelestarian bahasa daerah, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kementerian Dalam Negeri. Apakah ada Kementerian lain yang perlu terlibat dalam mendukung pelestarian dan perlindungan bahasa? Demikian juga pada tingkat lokal, apakah yang bertanggung jawab terhadap pelestarian dan perlindungan bahasa adalah Balai atau Kantor Bahasa atau Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi?

Dengan tidak adanya peraturan pelaksanaan, maka batas-batas kewenangan kerja pada institusi pemerintah juga menjadi tidak jelas. Badan Bahasa yang ada di tingkat pusat nampaknya lebih berorientasi pada pembentukan dan pemapanan bahasa

Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama dalam men-sinkronisasikan dengan bahasa asing yang masuk seiring merebaknya globalisasi. Sedangkan di kalangan Pemerintah Daerah pada umumnya tidak memiliki pakar yang mumpuni dalam bidang kebahasaan. Selain itu, gejala yang nampak pada pemerintah daerah adalah sangat kurang memiliki perhatian untuk melestarikan dan melindungi bahasa lokal.

Dalam era globalisasi dimana informasi dan komunikasi dapat dikatakan sangat terbuka sekarang ini, memang tidak dapat dihindari terjadinya difusi kosakata bahasa asing ke dalam bahasa yang digunakan masyarakat. Berbagai istilah asing sering terdengar terlontar begitu saja secara refleks dalam percakapan sehari-hari, baik pada kalangan bisnis maupun kalangan intelektual. Gejala ini nampak lebih mencolok terutama pada kelompok menengah berusia muda. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, nampak agak tergeser oleh bahasa pergaulan kelompok menengah perkotaan baru yang dianggap lebih bergengsi. Bahasa gaul baru ini sarat dengan sisipan bahasa asing, terutama pada istilah-istilah bisnis dan teknologi. Sisipan tersebut mengekspresikan pengetahuan pembicara bukan hanya mengenai bidang bisnis dan teknologi, melainkan juga mengenai perkembangan berbagai hal pada lingkup global seperti mode, olahraga, musik, dan lain-lain.

Pada situasi demikian, ketiadaan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait substansi perlindungan bahasa daerah menimbulkan ketidakjelasan di tingkat lokal. Keadaan kemudian menjadi lebih tidak menentu lagi ketika sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelestarian dan perlindungan bahasa ke daerah-daerah juga tidak dilakukan secara maksimal. Kalaupun ada sosialisasi, sasaran sosialisasi barangkali tidak mencakup seluruh pihak yang memiliki

wewenang atau berkaitan dengan pembentukan garis kebijakan dan pelaksanaan pelestarian dan perlindungan bahasa daerah. Pihak-pihak tersebut antara lain DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas-dinas Daerah terkait dan tokoh masyarakat etnis yang bahasanya perlu dilestarikan dan dilindungi. Seperti diketahui, persoalan pelestarian dan perlindungan bahasa daerah adalah termasuk dalam bidang yang didesentralisasikan kepada daerah. Pada kesibukan banyak urusan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah, maka pelestarian dan perlindungan bahasa daerah yang lumayan rumit, barangkali dianggap kurang populer dan kurang menarik karena tidak profitabel secara ekonomis dan memerlukan banyak kerja, menjadi cenderung terabaikan.<sup>2</sup>

## **2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri**

Selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, peraturan penting menyangkut pelestarian dan pengembangan bahasa daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2007<sup>3</sup> tentang pedoman bagi kepala daerah dalam

---

<sup>2</sup>Di Kabupaten Halmahera Utara, sampai pertengahan tahun 2014 belum dibuat Perda tentang Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah yang dapat menjadi pijakan aparat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan menyangkut pelestarian dan perlindungan bahasa, padahal di wilayah tersebut banyak bahasa daerah yang berada dalam kondisi terancam punah, antara lain Bahasa Pagu. Lebih memprihatinkan lagi, peraturan perundang-undangan tentang pelestarian dan perlindungan bahasa daerah, baik yang berbentuk Undang-undang maupun Peraturan Mendagri, dan bahkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara umumnya belum diketahui oleh pihak DPRD Kabupaten.

<sup>3</sup> Urutan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian dan perlindungan bahasa daerah agak tidak lazim, karena dari undang-undang, tanpa memiliki Peraturan Pemerintah dan

pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah yang antara lain menyatakan:

Kepala Daerah bertugas melaksanakan:

- (a) Pelestarian dan pengutamakan penggunaan Bahasa Negara di daerah;
- (b) Pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia;
- (c) Sosialisasi penggunaan Bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahandaerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usahaswasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- (d) Sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian dan pengembanganseni budaya di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut,aktivitas kepala daerah antara lain:

- (a) Melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengutamakan penggunaan bahasa negara atas bahasa-bahasa lainnya pada berbagai forum resmi di daerah.
- (b) Menerbitkan petunjuk kepada seluruh aparaturnya di daerah dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badanusaha/badan

---

Keputusan Presiden, langsung diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keadaan ini dapat ditafsirkan sebagai kurangnya kepedulian Pemerintah Pusat untuk melestarikan dan melindungi bahasa daerah.

sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamakan penggunaan Bahasa Negara.

- (c) Memberikan fasilitas untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Negara dan bahasadaerah.
- (d) Bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan.

Dinyatakan juga pada Permendagri No. 40 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan tugas tersebut dapat melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah atau negara, dan/atau lembaga non pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah terbit lebih awal dari Undang-undang No. 24 Tahun 2009, walaupun nampak searah, namun jelas bukan ditujukan untuk menindaklanjuti maksud Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tersebut. Lagipula, kalaupun ingin dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, tidak cukup hanya sekedar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), karena persoalan bahasa daerah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri saja, melainkan mencakup juga bidang-bidang yang menjadi bagian kompetensi kementerian lain. Dengan demikian, maka perlu juga mendapat perhatian dan dukungan gerakan dari beberapa kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan kementerian atau lembaga lain yang berkaitan. Kementerian-kementerian ini yang secara hierarki struktural tidak tunduk kepada Kemendagri, tidak dapat diatur hanya oleh Peraturan Kemendagri, melainkan

perlu diatur dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya setingkat Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Kemendagri hanya dapat dianggap sebagai salah satu petunjuk pelaksanaan mengenai kebahasaan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat Pemerintah Daerah yang di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri saja, tetapi belum cukup memadai jika ditinjau dari segi ruang lingkup keterlibatan para pihak, maupun jika dilihat dari cakupan substansinya untuk menjadi petunjuk yang memadai dalam melakukan pelestarian dan perlindungan bahasa daerah.

Respon Pemerintah Daerah terhadap Permendagri No. 40 Tahun 2007 juga masih sangat kurang. Kebanyakan daerah belum menindaklanjuti Permendagri tersebut baik dalam bentuk pembuatan Peraturan Daerah untuk menjadi payung kebijakan bagi berbagai aktivitas pelestarian dan perlindungan bahasa, maupun berupa aktivitas-aktivitas untuk melaksanakan Permendagri. Kalaupun ada, ruang blingkup kegiatannya masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Firman Susilo<sup>4</sup>,

“.....sampai sekarang masih minim pemerintahan daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bahasa. Salah satu yang cukup peduli yakni Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meski hanya membantu penerbitan kamus bahasa daerah.”

“ Di daerah pehuluan sungai dan pedalaman, juga rawan “kehilangan” bahasa lokal. Di Nanga Enap, hulu Sungai Kapuas misalnya, sebuah penelitian singkat menunjukkan penutur bahasa Aoheng hanya tersisa tiga orang. “Ini belum termasuk bahasa-bahasa lain yang belum terdeteksi kelestariannya”

Di samping persoalan keterbatasan kewenangan Kemendagri dalam hal ruang lingkup yang mengatur keterlibatan institusi

---

<sup>4</sup>Kepala Balai Bahasa Kalimantan Barat, 2014.

pemerintah yang menyangkut kementerian lain, jika ditelaah secara lebih dalam, secara substansial, peraturan tersebut juga lebih menitikberatkan perhatian pada penggunaan dan pemeliharaan Bahasa Negara, bukan Bahasa Daerah.<sup>5</sup> Pasal yang menyatakan pengutamaan penggunaan Bahasa Negara, dan pasal yang menentukan luasnya ranah penggunaan Bahasa Negeradi masyarakat, antara lain penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah memperlihatkan betapa lebih pentingnya penggunaan Bahasa Negara dari pada bahasa daerah. Ketentuan Permendagri ini memiliki kelemahan karena tidak sinkron dengan bunyi Pasal 33 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang menyatakan dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada masa-masa awal pendidikan. Pada Permendagri ini terdapat kerancuan jika dijejerkan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Ketentuan Permendagri ini, jika diterapkan secara kaku dan harfiah, tidak disikapi secara faktual, kondisional dan proporsional, dengan tidak melihat Undang-undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, dapat menjadi beban yang cukup

---

<sup>5</sup> Pada kasus lain, terutama pada daerah perbatasan dengan negara lain, menitikberatkan pengutamaan pelestarian dan perlindungan Bahasa Negara barangkali menjadi suatu hal yang penting, karena bahasa merupakan identitas suatu bangsa atau negara. Seperti dikatakan Firman Susilo, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, lepasnya Pulau Sipadan – Ligitan ke wilayah Malaysia. “Salah satunya karena faktor bahasa. Bahasa Indonesia sudah tidak lagi menjadi bahasa utama di pulau itu melainkan bahasa Malaysia,” Sedangkan Kalimantan Barat yang memiliki berbatasan dengan Malaysia sepanjang 875 kilometer hingga kini belum melakukan pemetaan bahasa di kawasan perbatasan. Ia mengaku khawatir, tanpaantisipasi secara tepat, lambat laun bahasa Indonesia di perbatasan akan semakin tertekan dan ditinggalkan.

berat bagi upaya melestarikan dan melindungi bahasa-bahasa daerah. Bagi bahasa daerah yang masih relatif sehat saja, Permendagri ini dapat dikatakan tidak terlalu mendukung pemeliharaan bahasa daerah, terlebih pada bahasa-bahasa daerah yang berada dalam keadaan terancam punah, yang memerlukan upaya-upaya ekstra dan berkelanjutan dalam merevitalisasi bahasa tersebut agar dapat menjadi sehat kembali.

Dengan lebih memberi perhatian kepada eksistensi Bahasa Negara, Peraturan Kemendagri tersebut tidak mencerminkan pengetahuan yang cukup tentang kondisi eksistensi bahasa daerah pada umumnya, sehingga tidak menyinggung tentang upaya untuk merevitalisasi bahasa daerah yang terancam punah. Padahal kondisi terancam punah sudah menjadi gejala umum yang nampak pada banyak bahasa daerah, terutama bahasa etnis yang jumlah penuturnya tidak banyak.

Kondisi ketergerusan banyak bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, nampaknya belum terlalu merisaukan pemerintah pusat dan daerah, walaupun sudah sering hasil penelitian para pakar bahasa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, menemukan dan mengekspose banyaknya bahasa daerah di Indonesia yang sudah terancam punah.<sup>6</sup> Dengan latar

---

<sup>6</sup> *Summer Institute of Linguistic (SIL)* dalam publikasi mutakhirnya (2006), menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa. Di Tanah Papua terdapat jumlah terbesar yakni 280 bahasa. sementara menurut Pusat Bahasa (Balai Bahasa Jayapura) yang telah bekerja mengumpulkan data bahasa daerah di Papua dan Papua Barat bahwa telah diidentifikasi ada 270 bahasa daerah (data yang baru dikumpulkan) dan masih akan bekerja hingga tahun 2014. Para pemerhati bahasa mengkhawatirkan kelestarian bahasa daerah karena semakin berkurang penuturnya. Kekhawatiran ini senada dengan perkiraan UNESCO bahwa pada abad ke-21 ini separuh dari enam ribu

belakang kepentingan mempertahankan dan memupuk integrasi nasional, barangkali merevitalisasi bahasa-bahasa daerah yang terancam punah tersebut dianggap sebagai salah satu aktivitas menghidupkan kembali sikap kedaerahan yang kontra produktif bagi kepentingan integrasi bangsa. Dalam pandangan ini, integrasi diasosiasikan sebagai uniformitas. Padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya. Integrasi dapat hidup, berada bersama-sama dan berdampingan dengan pluralitas. Lagipula, sifat dasar bangsa Indonesia adalah plural. Menindih pluralitas menjadi uniformitas untuk kepentingan integrasi, dapat berarti menghilangkan sifat dasar yang plural menjadi entitas baru yang berbeda sama sekali dengan sifat dasar yang dimiliki masyarakat Indonesia. Perlakuan seperti ini sudah terbukti tidak efektif, malahan menimbulkan banyak gejolak seperti terjadi pada masa

---

bahasa yang ada di dunia ini terancam punah (Tempo, 21 Februari 2007). Dari 6 ribu bahasa yang sudah diketahui saat ini, 61%nya merupakan bahasa yang digunakan di kawasan Asia Pasifik dan 726 lebih diantaranya dipakai di wilayah Indonesia. Menurut data UNESCO, saat ini terdapat sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia, tetapi bahasa-bahasa tersebut terbagi diantara penduduk dunia secara tidak merata. Lebih dari 90% penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar hanya menggunakan sekitar 300 bahasa saja, di antaranya Bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol dan Inggris. Bahasa-bahasa tersebut sering disebut sebagai bahasa mayoritas. Kurang dari 10% dari total penduduk dunia berbicara dengan menggunakan sisanya yaitu 5.700 bahasa sebagai bahasa minoritas. Dari semua bahasa minoritas ini, 3.481 (61%) ditemukan di Kawasan Asia dan Pasifik. Sangat tragis, kepunahan yang dialami bahasa-bahasa ibu tersebut bukan karena bahasa itu hilang atau lenyap dari lingkungan peradaban, melainkan para penuturnya meninggalkannya dan bergeser ke penggunaan bahasa lain yang dianggap lebih menguntungkan, baik segi ekonomi, sosial, politik, maupun psikologis.

lampau dan semakin memperoleh reaksi keras dari masyarakat pada masa-masa akhir berkuasanya Orde Baru.

Tatkala Pemerintah tidak memiliki perhatian cukup terhadap keberlanjutan eksistensi bahasa daerah dan pihak lembaga legislatif sangat sibuk dengan agenda politik mereka, sekian banyak bahasa daerah yang terancam punah dan cenderung terabaikan, menanti, memerlukan perhatian dan sentuhan. Kemudian siapakah pihak yang dapat dan pantas muncul ke depan, minimal untuk menyusun dan menyajikan rancangan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden yang dapat mengelaborasi lebih lanjut payung hukum yang sudah ada pada UUD 1945, Undang-undang No 20 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 24 Tahun 2009? Jawaban terhadap pertanyaan ini sulit diharapkan muncul dari Badan Bahasa yang cenderung lebih memberi perhatian pada eksisnya Bahasa Negara. Apakah jawabannya dapat muncul dari Asosiasi Linguis atau Asosiasi Pemerintah Daerah, atau mungkin dari LIPI yang memiliki banyak pakar humanis? Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah membentuk tim kerja Penyusun Peraturan Pemerintah Tentang Revitalisasi Bahasa Daerah Terancam Punah yang anggota-anggotanya berasal dari lembaga-lembaga tersebut dan perguruan tinggi.

### **3. Kebijakan dan Langkah-langkah Perlindungan Bahasa**

Dalam hal pemeliharaan bahasa daerah, pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah di Maluku Utara. Setelah Peraturan Daerah ini ditelaah, ternyata Perda ini bukan bagian dari peraturan pelaksanaan Permendagri No 40 Tahun 2007. Nampaknya,

malahan Perda Provinsi ini merupakan reaksi negatif daerah terhadap Permendagri No 40 Tahun 2007 yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Reaksi ini didasarkan pada realitas kondisi kebahasaan daerah di Maluku Utara, di mana terdapat banyak bahasa daerah yang terancam punah.

Terdapat 2 (dua) alasan mengapa Perda Provinsi Maluku Utara dapat dianggap sebagai reaksi negatif terhadap Permendagri No. 40 Tahun 2007 dan juga bukan merupakan petunjuk pelaksanaan dari Permendagri itu. *Pertama*, konsideran Perda tersebut sama sekali tidak menyebutkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 sebagai salah satu acuan peraturan yang lebih tinggi, bahkan tidak menyebutkan Permendagri sama sekali. Perda tersebut malahan menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Kedua*, tujuan Peraturan Daerah Provinsi tersebut lebih memfokuskan pada pemeliharaan bahasa dan sastra daerah daripada pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara, Hal ini sangat kontekstual dengan kondisi kebahasaan daerah di wilayah Maluku Utara. Fokus pada bahasa dan sastra daerah nampak nyata pada poin-poin tujuan Perda yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri, kebanggaan dan semangat untuk membangun daerah;
- (2) Memantapkan kedudukan, fungsi bahasa dan sastra di setiap daerah;
- (3) Melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa dan sastra daerah yang merupakan unsur utama

kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;

- (4) Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra daerah bagi masyarakat.

Selain pada tujuan tersebut, fokus pada bahasa dan sastra daerah juga nampak pada penentuan sasaran Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang menyatakan:

- (1) Terwujudnya kurikulum pendidikan formal dan non formal bahasa dan sastra daerah;
- (2) Terwujudnya penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar;
- (3) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa dan sastra daerah.

Dari formulasi sasaran Perda ini, nampak keinginan pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan peranan, status dan prestise bahasa dan sastra daerah. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan mengintroduksi bahasa dan sastra daerah dalam bidang pendidikan. Selain itu, pada sasaran poin ketiga, terkandung pengertian meningkatkan penggunaan bahasa daerah pada ranah rumah tangga dan lingkungan kecil ketetangaan.

Namun demikian, walaupun idealisme dan substansi Perda Provinsi Maluku Utara ini sangat kontekstual dengan kondisi kebahasaan di wilayah Maluku Utara, rupanya Peraturan Daerah Provinsi ini belum disosialisasikan secara layak<sup>7</sup>,

---

<sup>7</sup>Balai Bahasa Maluku Utara yang berkantor di Kota Ternate misalnya, baru memperoleh kopi Perda tersebut pada bulan April tahun

sehingga pihak pemerintah kabupaten/kota yang berada di lingkungan Provinsi Maluku Utara sendiri belum mengetahui, apalagi memahami dan menerapkannya. Sehingga tidak mengherankan jikalau peraturan-peraturan ini belum mendapat respon cukup baik dari pihak pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Di Kabupaten Halmahera Utara misalnya, sampai tahun 2014 belum terdapat Peraturan Daerah Kabupaten yang menindaklanjuti Perda Provinsi Maluku Utara yang mengatur mengenai pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah, apalagi tentang bahasa Pagu. Fenomena tidak diketahuinya peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian dan perlindungan bahasa daerah oleh kalangan pemerintah kabupaten/kota ini selain disebabkan sosialisasi peraturan yang minimal, juga disinyalir karena tidak dilakukannya pemantauan yang maksimal mengenai implementasi suatu peraturan dari pihak Provinsi dan pemerintah pusat. Fenomena ini, dapat disebabkan oleh sifat otonom dari pemerintah kabupaten yang bupatinya dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga merasa tidak perlu terlalu patuh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bisa jadi juga karena persoalan pelestarian dan perlindungan bahasa daerah tidak dianggap sebagai persoalan serius oleh kalangan Kemendagrian pemerintah provinsi sendiri, sehingga kurang mendapat perhatian secara proporsional.

Di tengah-tengah ketidakjelasan peraturan dan petunjuk implementasinya, dan rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Halmahera Utara untuk menghidupkan kembali bahasa daerah, termasuk bahasa Pagu. Tetapi upaya-

---

2014, dan diperoleh dari peneliti LIPI. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah di daerah tidak berjalan baik.

upaya tersebut masih terbatas dalam skala sangat mikro, bersifat sporadis, terlepas satu dengan yang lain, dan tidak berada dalam bingkai sistem yang jelas, sehingga sangat diragukan keajegan dan efektivitasnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara misalnya, dengan program meningkatkan kebudayaan daerah, telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian bahasa daerah. Antara lain membuat kamus sederhana bahasa Tobelo dan bahasa Galela, serta melakukan pelatihan terhadap pensiunan guru, para tokoh suku yang memiliki potensi sebagai pendidik untuk menjadi pengajar pada bahasa suku masing-masing. Para tokoh ini, setelah dilatih Pelatihan Pelatih (*training of trainer*) secara terpusat di ibukota kabupaten, diharapkan dapat menjadi pengajar bakal calon guru bahasa sukunya di wilayah masing-masing. Dengan adanya aktivitas ini, walaupun kegiatan tersebut terdapat kesan masih berorientasi ke Tobelo sebagai pusat pemerintahan Pemda Halmahera Utara<sup>8</sup>, paling tidak, sudah nampak ada gerakan dan upaya dari pihak pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi bahasa-bahasa daerah<sup>9</sup> di Halmahera Utara.

Sayangnya, aktivitas yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini tidak terjadi pada Dinas Pendidikan Halmahera Utara. Sejak masa awal penelitian pada tahun 2011, walaupun

---

<sup>8</sup> Orang-orang dari suku Tobelo banyak yang menduduki jabatan di Pemda Halmahera Utara.

<sup>9</sup> Bupati Halmahera Utara, selalu mengetengahkan pentingnya kesamaan asal-usul, adat dan kebudayaan masyarakat untuk menjaga persatuan dan perdamaian di Halmahera Utara. Dengan menetapkan asal-usul dan kebudayaan daerah sebagai prioritas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki posisi dan peranan penting di dalam struktur Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dinas Pendidikan yang pada waktu itu diwakili oleh seorang kepala bidangnya mengakui pentingnya menghidupkan kembali bahasa daerah yang terancam punah, tetapi sampai pada diskusi terfokus di kalangan pejabat pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan bulan Mei tahun 2014, masih belum terdapat aktivitas berarti untuk mengatasi persoalan tersebut. Persoalan utamanya ialah belum terdapat Peraturan Daerah yang memayungi berlangsungnya aktivitas tersebut. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut dianggap sangat penting oleh Dinas Pendidikan karena akan menjadi dasar disetujuinya pengajuan program yang di dalamnya menyangkut anggaran.

Pada tahun 2014 ini, terdapat perkembangan yang patut diapresiasi karena menurut Yesaya Banari, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, pihak DPRD sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Daerah di Halmahera Utara. Diharapkan Peraturan Daerah tersebut selesai tahun ini, sehingga dapat dijadikan dasar bagi dinas-dinas terkait untuk mengajukan program yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Perkembangan lebih lanjut, diskusi terfokus bulan Mei tahun 2014 di Pemda ternyata menggugah kesadaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara untuk mengadakan rapat dengan para guru dan pemuka adat untuk membicarakan kemungkinan menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal (mulok) kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Rapat di bulan Juni 2014 itu berhasil mengambil keputusan menetapkan 6 (enam) dari 9 (sembilan)<sup>10</sup> bahasa suku yang ada di Halmahera

---

<sup>10</sup> Sebenarnya di Kabupaten Halmahera Utara terdapat 9 (Sembilan) suku asli yang masing-masing memiliki bahasa, tetapi karena yang dianggap relatif siap baru 6 (enam) suku, maka bahasa tiga suku lainnya belum ditetapkan sebagai mata ajar muatan lokal.

Utara akan diajarkan sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah di Kabupaten Halmahera Utara. Penetapan ini juga dilanjutkan dengan beberapa langkah yang diperlukan, antara lain menyusun kurikulum dan bahan ajar dan merekrut para pengajarnya.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Permendagri No. 40 Tahun 2007, menurut seorang informan, diperkirakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang mengatur kebijakan pelestarian, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah tersebut selain memuat substansi pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, juga akan memuat jalur yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut. Jalur-jalur tersebut antara lain:

- (1) Jalur kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang implementasinya dilakukan melalui masyarakat adat yaitu kepala-kepala dan tokoh-tokoh adat yang berada di wilayah masing-masing.
- (2) Jalur Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang implementasinya dilakukan oleh sekolah-sekolah yang tersebar di wilayah-wilayah yang bahasanya berada dalam keadaan terancam punah.
- (3) Jalur Pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan yang membawahi struktur pemerintahan vertikal ke bawah yaitu para Camat dan Kepala Desa/Lurah. Implementasi pelaksanaan jalur ini dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing.

Distribusi peran pada ketiga jalur ini dianggap penting karena masing-masing memiliki area operasional bidang kekuasaannya sendiri-sendiri. Camat dan Kepala Desa sebagai kepala eksekutif di wilayahnya, memiliki peran penting dalam

upaya melestarikan dan mengembangkan bahasa suku yang terdapat di wilayahnya. Tanpa memberikan peran kepada Camat dan Kepala Desa, aktivitas pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sulit terkoordinasi, dan bukan tidak mungkin akan direpotkan persoalan-persoalan birokrasi pemerintahan, karena pada lingkup kecamatan, Kepala Seksi Pendidikan dan Kepala Seksi yang membidangi kebudayaan dan pariwisata, bertanggung jawab kepada Camat.

Demikian juga jika pengajaran bahasa lokal ingin dilakukan pada jalur rumah tangga dengan metode belajar bahasa ibu di rumah. Para Kepala dan Tokoh Adat perlu bersama-sama dengan Kepala Desa dan aparatnya mempengaruhi, menganjurkan atau bahkan memerintahkan warganya untuk menggunakan bahasa Pagu di areal rumah tangga dan lingkungan desa. Hal ini akan menimbulkan kesan yang kuat dan berpengaruh terhadap respon dan sikap warga masyarakat.

Dalam kaitan dengan pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal yang akan ditempuh melalui jalur pendidikan formal, unit dan area pelaksanaan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah juga dapat setingkat kecamatan, tetapi dapat juga ditentukan pada skala desa. Di Kecamatan Tobelo misalnya, karena seluruh kecamatan tersebut terdiri dari desa-desa yang bahasa suku mayoritasnya adalah bahasa Tobelo, bisa saja ditentukan unit pelaksanaannya berada pada tingkat kecamatan. Dalam arti, seluruh muatan lokal unit pendidikan di Kecamatan Tobelo mengajarkan pelajaran bahasa Tobelo. Demikian juga dengan Kecamatan Galela dapat dilakukan hal yang sama. Tetapi di Kecamatan Malifut, tidak dapat dilakukan di semua desa karena yang mayoritas penduduknya berbahasa Pagu hanya 5 (lima) desa dari 21 (dua puluh satu) desa yang terdapat di kecamatan itu. Sedangkan desa lainnya berbahasa

Makian. Dalam keadaan yang tidak homogen itu, maka unit area operasionalnya hanya pada tingkat desa. Demikian juga untuk keadaan yang terdapat di Kecamatan Kao Barat dan Kecamatan Kao yang sangat heterogen, tidak dapat ditetapkan pada skala kecamatan. Informasi yang muncul pada akhir-akhir ini dari Sangaji Pagu, di lingkungan wilayah suku Pagu akan ditentukan bahasa Pagu sebagai muatan lokal walaupun di wilayah tersebut berdomisili berbagai etnis lain yang jumlahnya juga relatif banyak. Pertimbangannya, wilayah tersebut adalah wilayah suku Pagu, orang-orang yang berdomisili di sana perlu menghormati dan mempelajari bahasa dan kebudayaan suku Pagu.

Ketentuan tingkat nasional tentang muatan lokal, memungkinkan pemerintah daerah kabupaten mensupervisi muatan lokal pada tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP. Sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 77N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa:

- a. Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
- b. Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa:

- a. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah;
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar;
- c. Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan
- d. Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pendidikan muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- (1) Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
- (2) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
- (3) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/ aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Perlu dicatat bahwa dalam kaitan kebijakan dan perencanaan bahasa di Halmahera Utara pemerintah daerah Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Hein

Namotemo, MSi mempunyai perhatian yang sangat kuat terhadap masyarakat adat. Sejak menjadi bupati (2005) ia telah mencanangkan program pengembangan diri tiap-tiap komunitas adat di wilayah pemerintahannya. Ia bergerak bersama jajaran pemerintahannya dan masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat adat dan menjadikan adat sebagai “ideologi” pemersatu masyarakat daerahnya yang plural dari berbagai segi: agama, etnis, bahasa dan kebudayaan. Dengan tema adat, Bupati Namotemo mempersatukan rakyat di wilayahnya yang baru saja mentas dari konflik horizontal yang mengerikan di tahun 1999/2000.<sup>11</sup> Dengan adat ia berusaha merekonsiliasi berbagai golongan yang terlibat konflik sehingga berhasil membangun Hibua Lamo (rumah besar) di atas puing-puing bangunan lama, sebagai simbol pemersatu berbagai masyarakat adat. Ia terlibat dalam kepengurusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi masyarakat adat yang menjangkau berbagai daerah di seluruh Indonesia. Slogannya yang terkenal “agama boleh beda, suku boleh beda, tetapi orang Halmahera Utara adalah satu adat dan satu asal usul”.

Kecintaannya kepada adat ia manifestasikan dalam pakaian adat yang selalu ia kenakan pada upacara-upacara penting di wilayahnya. Foto resminya mengenakan pakaian adat, dan dengan berkostum adat pula. Baliho-baliho dipajang di banyak lokasi strategis di wilayahnya. Gambar seperti itu pula yang dipajang di seluruh Provinsi Maluku Utara ketika ia mencalonkan diri pada pilkada Gubernur Maluku Utara tahun 2013. Namotemo mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah Maluku Utara melalui jalur independen. Tanpa dukungan

---

<sup>11</sup>Ketika konflik horizontal, Hein Namotemo menjabat sebagai camat Tobelo.

partai politik, dengan mengusung “ideologi” adat, ia percaya diri bahwa kemenangan bakal diraih.<sup>12</sup> Oleh karena itu, ketika peneliti beraudiensi dengan Bupati Hein Namotemo, ia sangat antusias mendukung program penelitian bahasa oleh LIPI di wilayahnya.

Selain dukungan yang penuh pada pengembangan dan pelestarian bahasa dan budaya komunitas setempat, pemerintah Halmahera Utara juga sangat mendukung penguatan hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya. Adanya kesadaran masing-masing masyarakat adat sendiri akan pentingnya mempertahankan budaya dan bahasanya sebagai penguatan jati diri mereka, ditambah dengan dukungan pemerintah setempat maka upaya revitalisasi bahasa daerah memberikan optimisme yang besar terhadap penelitian ini. Berdasarkan fakta situasi tersebut di atas, dapat diyakini bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan mengeluarkan peraturan pemerintah daerah mengenai penguatan budaya dan bahasa suku yang ada dalam wilayahnya.

Betapun perundang-undangan sudah cukup lengkap di tingkat atas, peraturan itu perlu dijabarkan dalam bentuk petunjuk operasional atau *standar operating procedure* (SOP) pada tingkat di bawahnya. Kenyataannya belum terdapat peraturan pelaksanaan undang-undang dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden yang menjadi petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan pelestarian dan perlindungan bahasa daerah. Akibat dari tidak adanya peraturan pelaksanaan, maka terjadi ketidakjelasan substansi yang perlu di tangani dan hierarkhi tanggung jawab pada instansi pemerintah.

---

<sup>12</sup> Dalam pemilihan kepala daerah (gubernur) itu Hein Namotemo tidak berhasil.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah merupakan peraturan daerah yang berkeinginan meningkatkan peranan dan prestise bahasa daerah. Perda ini juga memerlukan pedoman operasional agar langkah-langkah pelaksanaan peraturan tersebut dapat segera dimulai. Oleh karena itu, penyusunan petunjuk operasional (juklak) sangat mendesak dilakukan. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan peraturan daerah itu, infrastruktur apa yang harus dibangun agar peraturan daerah itu dapat dilaksanakan dan seterusnya harus dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan. Jika pembinaan bahasa dan sastra daerah harus melibatkan masyarakat dan keluarga, perlu ada petunjuk bagaimana tujuan ini dapat dijalankan. Jikalau langkah awal yang ingin ditempuh daerah adalah menyusun kurikulum pendidikan bahasa daerah, misalnya maka petunjuk penyusunan kurikulum harus dibuat. Lebih dari itu semua, koordinasi yang rapi antar instansi terkait dalam pelestarian bahasa yang terancam punah merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan.



---

---

## **BAB III**

---

---

# **PERENCANAAN BAHASA**

### **1. Perencanaan Status dan Prabawa**

**K**erangka kerja Perencanaan Status Bahasa dan Perencanaan Prabawa Bahasa, sama-sama telah dilaksanakan sejak awal mula proyek ini yaitu pada tahun 2011. Pada hakikatnya kedua perencanaan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat sekaligus pemerintah setempat mengenai pentingnya menghargai dan selanjutnya mempertahankan bahasa dan budaya sebagai bagian dari jati diri masyarakat.

Tim peneliti bahasa dan budaya Pagu sejak awal proyek yang dimulai pada tahun 2011 telah melakukan pendekatan dengan masyarakat Pagu terutama dengan para ketua adat. Semenjak awal tahun 2012 komunitas adat Pagu mengangkat seorang pemimpin adat baru yaitu seorang yang peduli dengan keberlangsungan hidup budaya, bahasa dan hak wilayah masyarakat Pagu, seorang wanita relatif muda, energik dan aktivis bernama Afrida Erna Ngato. Posisi yang diberikan kepada Ibu Ida (panggilan sehari-hari beliau) adalah kedudukan tertinggi dalam tingkat struktur masyarakat Pagu, yang dalam bahasa Pagunya disebut "*O Tukul ma Lamoko*" (arti harafiahnya "tingkat terbesar") dan dalam masyarakat Maluku Utara dikenal sebagai "Sangaji". Sebagai pemegang pucuk kepemimpinan dalam masyarakat adat, Afrida Erna Ngato mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakatnya. Semenjak masa pengangkatannya itu pula tim peneliti bahasa dan budaya Pagu telah menjalin kerja sama erat dengan beliau untuk mengangkat kembali dan mempertahankan bahasa dan budaya Pagu. Dari sejak sebelum diangkat menjadi Sangaji, Afrida sudah memberikan apresiasi

terhadap penelitian bahasa Pagu, dan menyediakan diri “setiap saat” untuk dihubungi untuk memberi informasi mengenai berbagai hal terkait Pagu, adat dan bahasanya.

Upaya penguatan kembali penggunaan bahasa dan budaya Pagu termasuk dalam kerangka kerja Perencanaan Status. Dalam hal ini masyarakat Pagu memproklamirkan bahwa bahasa Pagu adalah bahasa mereka sedangkan budaya Pagu adalah budaya mereka, yang berdampak kepada pengakuan dari komunitas tetangga mereka seperti masyarakat Makian, Tobelo, Modole, Loloda dan yang lainnya terhadap keberadaan komunitas Pagu dan wilayah adat mereka. Pengakuan tidak hanya didapat dari masyarakat adat lainnya namun juga dari pemerintah daerah setempat bahkan pusat. Penelitian untuk mencari bentuk penguatan kembali bahasa dan budaya Pagu ini berjalan dengan baik seiring dengan kerja sama yang dilakukan dengan pemimpin tertinggi masyarakat Pagu tersebut. Sejak itu, Sangaji Pagu kerap kali, baik bersama-sama dengan tim peneliti maupun tidak, berkunjung ke desa-desa Pagu dan mengajak masyarakatnya untuk tetap menggunakan bahasa dan budaya Pagu di samping mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Di samping itu Sangaji Pagu juga membuat paguyuban-paguyuban tempat anak-anak remaja mengenal dan belajar budaya, kerajinan, dan obat-obatan tradisional Pagu. Ia memberi nama perkumpulan itu sebagai “Sekolah Adat Pagu” di mana setiap minggu anggota perkumpulan berkumpul di rumah Sangaji, untuk mempraktikkan bahasa Pagu sambil belajar ketrampilan seperti membuat benda-benda yang biasa dipakai pada upacara adat perkawinan Pagu, membuat makanan tradisional Pagu, dan subjek lain mengenai budaya ke-Pagu-an.

Di sisi lain, penguatan bahasa dan budaya Pagu juga ditempuh dengan upaya mengajarkannya di dalam pendidikan

formal di sekolah. Upaya-upaya tersebut di atas sebenarnya dapat digolongkan dalam kerangka kerja Perencanaan Prabawa, karena hal itu mempunyai implikasi peningkatan martabat bahasa dan budaya Pagu, tidak hanya di kalangan masyarakat Pagu sendiri tetapi juga di antara masyarakat lain di sekitarnya.

Bekerja sama dengan Sangaji Pagu sebagai kepala suku Pagu yang juga adalah seorang guru sekolah dasar di desa tempat tinggalnya, Desa Sosol berdampak positif terhadap peningkatan wibawa bahasa Pagu. Sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah Halmahera Utara dan pejabat-pejabat terasnya, Sangaji Pagu melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dengan mengusung gagasan dari penelitian bahasa Pagu supaya bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Pagu lebih diperhatikan, bahwa bahasa daerah perlu diajarkan di sekolah formal. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Sangaji Pagu bersama peneliti telah menghasilkan beberapa kemajuan. Sebagai hasil dari pendekatan ini di antaranya pemerintah daerah menetapkan enam bahasa yang dianggap mewakili keseluruhan komunitas yang ada di Halmahera Utara (yaitu: Tobelo, Modole, Loloda, Tobaru, Galela dan Pagu), untuk wajib diajarkan sebagai pelajaran muatan lokal dari sekolah dasar, menengah pertama sampai menengah atas di wilayah masing-masing. Hal ini berarti mengangkat martabat/prabawa bahasa mereka di daerah masing-masing karena setiap murid baik mereka dari suku yang bersangkutan maupun bukan harus belajar bahasa-bahasa yang disebut di atas. Secara khusus bahasa Pagu, telah menjadi “Tuan di rumahnya sendiri”, karena anak-anak murid dari suku bangsa yang beragam seperti Makian,

Bugis, Batak, Jawa, dan lainnya yang tinggal di wilayah Pagu wajib belajar dan mengenal bahasa dan budaya Pagu di sekolah.<sup>13</sup>

Dalam penelitian lapangan tahun 2014, tim peneliti bahasa dan budaya Pagu tidak banyak lagi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Status dan Perencanaan Prabawa. Tim meyakini bahwa pada dasarnya dua kerangka kerja ini telah cukup berhasil, karena baik pada tingkatan masyarakat yang diwakili oleh peran kepemimpinan Ibu Sangaji maupun pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam penguatan status dan prabawa bahasa daerah dengan bukti pencapaian yang diulas di atas. Dalam penelitian lapangan tahun 2014 tim menitik-beratkan pada kerangka kerja Perencanaan Korpus dan Perencanaan Pendidikan. Berikut ini diuraikan masing-masing Perencanaan tersebut.

## 2. Perencanaan Korpus

Seperti sudah disinggung di muka, perencanaan korpus di antaranya meliputi pendokumentasian bahasa, standarisasi, modernisasi, dan pengembangan cara penulisan bahasa (*orthography*) serta pembuatan kamus, buku tata-bahasa dan bahan ajar bahasa. Dalam praktiknya hanya perekaman bahasa dan pembuatan kamus bahas Pagu dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan tenaga. Standarisasi, modernisasi, pembuatan *orthography*, penyusunan tata bahasa dan bahan ajar memerlukan ketrampilan khusus, dan waktu untuk membuat itu semua juga tidak singkat. Sementara itu revitalisasi bahasa Pagu merupakan kepentingan mendesak, yang apabila ditunda karena menunggu penyusunan semua komponen korpus

---

<sup>13</sup>Informasi selengkapnya tentang proses lahirnya keputusan ini diuraikan di bagian “perencanaan pendidikan”.

itu keterancaman bahasa semakin parah dan usaha pemertahanannya semakin rumit.

Pendokumentasian bahasa tahun 2014 dititikberatkan pada cerita-cerita rakyat, legenda ataupun sejarah. Penitikberatan ini dilakukan karena ditargetkan pada akhir penelitian ini tim akan membuat buku yang berisikan cerita-cerita tersebut agar sekaligus bisa dijadikan bahan ajar pada sekolah-sekolah Pagu. Pada saat ini proses membukukan cerita rakyat masih pada tahap transkripsi rekaman dan penerjemahannya oleh penutur bahasa Pagu.

Metode pendokumentasian cerita-cerita tersebut yaitu dengan merekam cerita seorang narasumber (atau dengan seorang atau beberapa pendengar lain yang bertanya atau berkomentar tentang cerita yang diberikan) dengan menggunakan alat rekam video sekaligus audio. Masing-masing rekaman tersebut akan ditranskripsi oleh beberapa penutur asli sendiri dalam program anotasi ELAN. Setelah ditranskripsi di ELAN rekaman akan dianalisa secara linguistik dengan menggunakan *Toolbox* untuk mendapatkan munculan tiap morfem (baik morfem bebas maupun terikat) dengan disertai dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Analisa linguistik ini nantinya akan dikumpulkan untuk melengkapi kamus Pagu-Indonesia-Inggris yang telah dibuat tahun sebelumnya.

#### **a. Rekaman Cerita Rakyat**

Dalam penelitian lapangan terdahulu tim peneliti telah mengumpulkan 11 cerita dengan metode perekaman yang sama. Penelitian lapangan tahun 2014 tim peneliti mengumpulkan lagi 15 cerita rakyat, sehingga jumlah keseluruhan rekaman cerita

rakyat sejak tahun 2012 sampai 2014 sebanyak 28 cerita rakyat,<sup>14</sup> sedangkan jumlah seluruh rekaman dari berbagai genre ada 82. 15 cerita yang dikumpulkan terakhir dirinci seperti di bawah ini:

**Tabel 2:** Cerita Rakyat yang Direkam dan Penuturnya.

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
1	Mongke Igobula; 75 tahun; warga desa Sosol, Malifut.  <b>Gambar 1.</b> Nenek Mongke Igobula	6,44 menit	1 Mei 2014	Cerita tentang persengketaan antara orang Pagu dan orang Modole pada jaman dahulu kala.
2	Mongke Igobula (75 thn)	4,45 menit	1 Mei 2014	Kisah tentang Bintang Fajar dan Bintang Timur yang tidak pernah bertemu. Konon mereka adalah kakak beradik Koluk (kakak laki-laki) dan adiknya Baladobok (adik perempuan) yang tidak pernah akur, sehingga suatu

<sup>14</sup> Lihat Lampiran 2, daftar rekaman seluruhnya disertai keterangan.

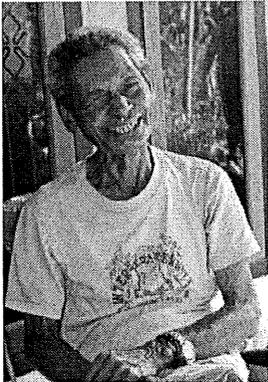
No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
				saat si Kakak memukul si Adik dengan sendok kayu panjang ( <i>aru-aru</i> ), yang menyebabkan mereka berpisah; Si Kakak pergi ke Timur sedangkan si Adik pergi ke Barat.
3	Mongke Igobula (75 thn)	5,42 menit	1 Mei 2014	Bercerita tentang <i>o Jini ma Wola</i> (rumah Jin) yaitu sebuah batu besar yang terletak di sebelah barat desa Sosol, dipercayai sebagai tempat leluhur orang Pagu sebagai penjaga desa orang Pagu terutama desa Sosol ( <i>o soana ma jajaga</i> ).
4	Lewi Bajuli (61 thn) dan Yulianus Bajuli (60 thn) keduanya warga desa Akesahu, Kao Barat.	16,38 menit	3 Mei 2014	Berlokasi di pantai Sumu Sosonotok (Sumur Pahat) di desa Akesahu,

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
	 <p><b>Gambar 2.</b> Lewi Bajuli (jongkok) dan Yulianus Bajuli (berdiri)</p>  <p><b>Gambar 3.</b> Bajuli bersaudara sedang memberi penjelasan kepada Ibu Ida Ngato Sangaji Pagu tentang tempat-tempat yang diceritakan</p>			<p>mengemukakan serentetan cerita mengenai latar belakang terjadinya beberapa tempat, yaitu (1) Sumu Sosonotok (sumur kecil di pantai yang berair tawar), (2) Sumu Roba (sebuah sumur kecil berair tawar di sisi lain dari pantai yang sama), (3) Ngii ma Saeke (sebuah tempat, harafiah. berarti ‘kepala ular’), (4) Goya Mosoles (sebuah tempat keramat, harafiah. ‘batu perempuan keramat’, dan (5) Peda-peda ma Doto (sebuah tempat, harafiah. ‘tanjung sagu’).</p>
5	Istri Lewi Bajuli (warga Akesahu)	6,58 menit	3 Mei 2014	Bertempat di kediaman keluarga Lewi

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
	 <p data-bbox="143 464 437 523"><b>Gambar 4.</b> istri Lewi Bajuli sedang bercerita</p>			<p data-bbox="766 240 949 858">Bajuli, istri Lewi Bajuli menceritakan kisah mengenai perempuan yang menjadi batu setelah memberi makan seekor anjing. Dalam kesempatan ini juga beliau bercerita mengenai Gunung Kotakota, yaitu tempat keramat bagi orang Pagu dan Morooka (tempat roh leluhur).</p>
6	<p data-bbox="143 863 356 890">Lewi Bajuli dan Istri</p>  <p data-bbox="143 1102 437 1209"><b>Gambar 5.</b> Lewi Bajuli dan istri sedang menceritakan tentang agama leluhur orang Pagu</p>	24,33 menit	3 Mei 2014	<p data-bbox="766 986 949 1098">Bercerita mengenai agama leluhur orang Pagu.</p>
7	<p data-bbox="143 1273 468 1326">Lewi Parasaja; kepala Adat Pagu desa Leleseng, Kao Barat</p>	12,57 menit	4 Mei 2014	<p data-bbox="766 1225 949 1367">Melaporkan kepada Ibu Ida Ngato sebagai Sangaji Pagu tentang rencana</p>

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
	 <p><b>Gambar 6.</b> ketua Adat Pagu desa Leleseng Lewi Parasaja sedang melaporkan kepada Ibu Ida Ngato Sangaji Pagu tentang rencana pembangunan "Kota Terpadu" di sekitar desanya</p>			<p>pembuatan Kota Terpadu di wilayah desa Leleseng dan sekitarnya, dan meminta pendapat Ibu Sangaji mengenai apa-apa yang harus dilakukannya menghadapi rencana pembangunan ini.</p>
8	<p>Alexander Kalawe (70 thn) warga desa Leleseng</p>  <p><b>Gambar 7.</b> Alexander Kalawe sedang mendongeng</p>	5,50 menit	4 Mei 2014	<p>Bercerita tentang seorang Pangeran yang berwujud seekor anjing. Akibat perbuatan baik seorang putri cantik kepada anjing itu, si anjing pun berubah kembali ke wujud aslinya menjadi seorang pangeran.</p>
9	Alexander Kalawe	9,05 menit	4 Mei 2014	<p>Bercerita tentang kisah seorang perempuan yang melahirkan seekor penyu dan seekor</p>

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
	 <p data-bbox="140 466 490 555"><b>Gambar 8.</b> Alexander Kalawe bercerita di antara para pendengarnya</p>			biawak. Ketika besar si biawak menjadi seekor belibis yang ternyata adalah seorang putri raja.
10	Alexander Kalawe	3,35 menit	4 Mei 2014	Bercerita tentang asal muasal desa Leleseng, yaitu mereka yang pada mulanya tinggal di desa Leleseng untuk menghindari upaya pembunuhan.
11	<p data-bbox="140 903 490 960">Kaleopas Badiri (58 thn) dari desa Wangeotak, Malifut</p>  <p data-bbox="140 1238 490 1257"><b>Gambar 9.</b> Kaleopas Badiri</p>	6,22 menit	27 April 2014	Bercerita tentang sejarah orang Pagu bahwa mereka sebagian berasal dari Sahu, Halmahera Barat.
12	Kaleopas Badiri	3,57 menit	27 April 2014	Mengisahkan perbedaan antara Isam dan Pagu;

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
				Isam merujuk kepada orangnya sedang Pagu merujuk pada wilayahnya.
13	Belt Lopa (70 thn) dari desa Sosol, Malifut 	12,00 menit	28 April 2014	Cerita tentang strategi perang antara dua raja dari Timur dan Barat.
14	Belt Lopa	8,54 menit	28 April 2014	Bercerita tentang pengalamannya mencari ikan di laut dengan John Wimbish seorang linguis dari Amerika yang melakukan penelitian bahasa Pagu di Sosol pada tahun 1988-1990 bersama istrinya seorang linguis juga Sandra

No	Nama Penutur	Panjang rekaman	Tanggal rekaman	Ringkasan cerita
				Wimbish.
15	Belt Lopa	6,55	28 April 2014	Bercerita tentang si bungsu dari 7 bersaudara yang menikah dengan seekor ular.

Sejauh ini baru ada empat rekaman yang selesai ditranskrip di ELAN dan juga dianalisa dengan *Toolbox*, keempat rekaman tersebut adalah: PAG-20120422, PAG-20120716, PAG-20120729 dan PAG-20120730-A. Beberapa dari rekaman yang ada masih dalam proses transkripsi di ELAN.

Semua rekaman yang ada akan ditranskripsi di ELAN dan juga di *Toolbox* dan selanjutnya akan disimpan dalam sebuah “Archive” penyimpanan yang canggih (baik itu di ELAR (The Endangered Language Archive) di SOAS London, LELA (the Leipzig Endangered Language Archive) di Max Planck Institute Leipzig, PARADISEC (The Pacific and Regional **Archive** for Digital Sources in Endangered Cultures) di Sydney Australia), ataupun Archive yang lainnya di dunia).

## b. Mantra

Tim juga berhasil mengumpulkan beberapa mantra dari Nenek Mongke Igobula, yang dikenal di desa Sosol sebagai dukun beranak dan juga pengobat.

Berikut adalah contoh mantra yang ditemukan:

- (1) Mantra untuk menetralkan makanan yang dianggap pamali ataupun mengandung “bahaya” kiriman dari orang lain.

***“o kiawa todiai bobosono ma akele todia, taumo la tooyomo tawakala idadi”***

Secara harfiah artinya: ‘saya tidak berbuat apa-apa, saya buang lalu saya makan, tidak akan terjadi apa-apa pada saya’.

(2) Mantra untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

***“Bismillah, nyagiraha serah tasoi tasoi moimoi ka bimilah”***

Secara harafiah artinya: ‘Bismillah, segala empat puluh empat (44) macam penyakit kita tolak semua, bismillah’.

Sebagai catatan, mantra di atas tampak jelas dipengaruhi oleh bahasa dan budaya Ternate yang di dalamnya menggunakan bacaan umat Islam ‘bismillah’.

### **3. Perencanaan Pendidikan Bahasa**

Dipercayai oleh masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah bahwa pendidikan bahasa daerah di sekolah merupakan upaya sangat penting yang harus dilakukan dalam rangka perlindungan dan pembinaan bahasa daerah yang terancam punah. Memang diakui bahwa membiasakan bercakap dengan bahasa daerah di rumah merupakan cara paling efektif dalam pemerolehan bahasa ibu bagi anak-anak generasi muda, tetapi masalahnya, praktik itu pada situasi sekarang sangat sulit dilaksanakan karena orang tua sendiri telah terbiasa dengan bahasa Melayu, walaupun masih bisa memahami bahasa daerah Pagu. Lagi pula pembiasaan berbicara dengan bahasa ibu di rumah tidak bisa dikontrol baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbeda dari hal itu, pengajaran bahasa ibu di sekolah selain dijalankan dengan perencanaan pembelajaran yang tertulis, metode pengajaran yang sistematis dan sesuai dengan perkembangan jiwa anak, anak didik juga dipaksa belajar karena

adanya evaluasi atau ujian hasil belajar secara periodik. Karena itu pemerintah dalam tahun 2014 dan seterusnya akan merumuskan dengan sungguh-sungguh pendidikan bahasa ibu di sekolah sebagai muatan lokal.

Sebetulnya, sebelum proyek penelitian bahasa LIPI dijalankan di tanah Pagu, Sekolah Dasar di Desa Sosol sudah pernah mengajarkan bahasa Pagu. Pelajaran bahasa daerah Pagu di sekolah dasar ini diprakarsai oleh Bapak Yesaya Ngato<sup>15</sup>, yaitu ayahanda kandung Ibu Afrida Erna Ngato, Sangaji Pagu. Sekarang upaya itu tetap dipertahankan oleh putri beliau, Afrida Ngato yang menjadi Kepala Suku (Sangaji) Pagu sekaligus pengajar di sekolah dasar negeri di desa Sosol sekaligus penggerak gerakan masyarakat adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Sangaji Pagu walaupun dengan keterbatasan bahan-bahan pelajaran yang dimiliki memberi beberapa ujian dalam bahasa Pagu sebagai syarat kelulusan untuk lulus SD. Salah satu caranya adalah menyuruh muridnya berpasang-pasangan untuk berkomunikasi dalam bahasa Pagu dalam konteks yang sudah ditentukan sebelumnya.

Untuk merencanakan pendidikan bahasa Pagu (dan juga bahasa-bahasa daerah lain di Kabupaten Halmahera Utara) tim peneliti Bahasa Pagu telah mengadakan *Focused Group Discussion* (FGD); Diskusi Kelompok Terfokus) pada tanggal 30

---

<sup>15</sup> Tim Penelitian Bahasa Pagu mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Yesaya Ngato ayahanda Ibu Ida Ngato, Sangaji Pagu ke hadapan sang Pencipta pada tanggal 10 Mei 2014 karena penyakit yang dideritanya. Dari segi pelestarian bahasa, tim memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa beliau berupaya memberi pelajaran bahasa Pagu kepada anak-anak didiknya. Semoga kiranya jasanya dikenang selalu oleh masyarakat Pagu khususnya dan masyarakat peduli bahasa secara umumnya.

April 2014 dengan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dan para *stakeholders* di kantor Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, DPRD setempat, pemimpin pemerintahan tingkat bawah seperti camat dan juga para tetua adat. Tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk mengetahui persepsi dan visi pemerintah dan masyarakat tentang pembinaan bahasa daerah dan upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan (perencanaan bahasa) untuk tujuan itu. Dari FGD itu terungkap bahwa pemerintah daerah maupun DPRD setempat sangat antusias untuk segera melakukan upaya pemertahanan bahasa daerah di wilayah administrasinya. Para peserta FGD menganggap sangat penting untuk membuat kebijakan yang mendukung terpeliharanya penggunaan bahasa daerah, misalnya dengan membuat peraturan daerah yang mengharuskan tiap-tiap sekolah memberikan pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Menurut mereka hanya dengan cara ini penggunaan bahasa daerah dapat dihidupkan kembali. FGD juga merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk segera membuat dan menyusun segala perangkat pembelajaran bahasa daerah yang diperlukan, seperti kurikulum, buku bahan ajar, pembekalan guru, dan metode pembelajaran muatan lokal berupa bahasa daerah.

Tidak berapa lama setelah FGD diadakan, Dinas Pendidikan Daerah Halmahera Utara menindaklanjuti desakan pembuatan kurikulum mulok bahasa daerah. Pada tanggal 14 Mei 2014 Dinas Pendidikan mengadakan rapat dengan segenap guru-guru bahasa daerah, petinggi adat yang ada di seluruh wilayah Halmahera Utara. Sangaji Pagu dan guru bahasa Pagu di Desa Sosol yang juga diundang dalam rapat tersebut memberikan informasi hasil rapat sebagai berikut:

- Pertemuan keseluruhannya dihadiri oleh 18 orang beberapa dari dinas Pendidikan Halut dan sisanya guru-guru bahasa/pemangku adat dari suku Modole, Galela, Loloda, Pagu/Isam dan Tobelo.
- Rapat itu memutuskan ada 6 bahasa daerah yang akan diajarkan di setiap jenjang sekolah yaitu SD, SMP, SMA dan yang setingkat. Keenam bahasa itu adalah bahasa, Galela, Tobelo, Loloda, Pagu, Tobaru dan Modole. Keenam bahasa tersebut dipilih dengan alasan bahwa ketiga ‘bahasa’ dari ‘suku’ yang lain adalah bagian dari suku bahasa yang ada, misalnya Boeng dan Tobelo Dalam (Togutil) adalah bagian dari suku Tobelo dan bahasanya adalah dialek Tobelo, sedangkan Kao/Towiliko adalah dialek dari bahasa Pagu.
- Dari keenam bahasa yang akan diajarkan sebagai mulok hanya ada empat bahasa yang telah mempunyai pengajar yaitu, dari Galela, Tobelo, Loloda dan Isam/Pagu; sedang dari Tobaru dan Modole belum ada pengajar. Untuk itu perlu diadakan program pengadaan guru-guru bahasa-bahasa daerah yang sudah ditetapkan.
- Rencana pengadaan Mulok bahasa daerah ini akan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Halmahera Utara di setiap sekolah SD, SMP dan SMA dan sederajat di seluruh Kabupaten Halmahera Utara.
- Pelajar yang bukan berasal dari suku setempat harus mengambil mulok yang diadakan di wilayah suku asli. Sebagai contoh, pelajar suku Makian di Malifut akan mendapatkan pelajaran bahasa Pagu di kelas muloknya.
- Keputusan ini akan segera dibuatkan Surat Keputusannya dalam waktu dekat.

Tim peneliti Pagu menyambut baik keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini, dan akan mendukung jika memungkinkan dengan membantu pembuatan bahan-bahan ajar. Namun demikian tim peneliti memberikan catatan mengenai keputusan menyatukan bahasa Pagu/Isam dengan bahasa Kao. Walaupun kedua bahasa memang secara linguistik punya kesamaan (karena kedua penutur bisa saling mengerti) namun secara pengakuan jati diri keduanya adalah suku yang berbeda, sehingga ada kemungkinan menimbulkan keberatan dari salah satu suku. Untuk mengatasi ini perlu ada diskusi yang menghasilkan keputusan yang menyenangkan kedua pihak.

Lembar-lembar bahan rapat di Dinas Pendidikan Halmahera Utara tertanggal 14 Mei 2014 dapat dilihat pada lampiran 1 (direkam dengan alat foto telepon genggam dan dikirim ke peneliti oleh Sangaji Pagu).

#### **a. Respons Masyarakat Pagu**

Pada tanggal 25 Juli 2014 Kementrian Pendidikan dan Budaya mengadakan pelatihan pembuatan kurikulum untuk seluruh guru di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang diadakan di Ibukota Tobelo. Dalam kesempatan ini Dinas Pendidikan setempat melakukan sosialisasi mata pelajaran wajib baru yaitu pelajaran bahasa dan budaya daerah yaitu enam bahasa yang sudah diputuskan kepada seluruh guru yang hadir. Lihat Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Kliping dari *Malut Pos*\_25 Juli 2014



Khusus untuk bahasa Pagu, Sangaji Afrida Erna Ngato sebagai kepala suku sekaligus pengajar bahasa daerah Pagu mengambil inisiatif untuk mengadakan sosialisasi penetapan bahasa dan budaya Pagu sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar sampai dengan menengah atas kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Pagu. Beliau meminta Dinas Pendidikan Halmahera Utara untuk membuat undangan kepada

seluruh kepala sekolah di wilayah Pagu untuk menghadiri acara sosialisasi mata pelajaran bahasa dan budaya Pagu. Acara ditentukan diadakan pada Rabu 6 Agustus 2014 di balai desa Sosol. Jumlah perwakilan sekolah-sekolah di wilayah Pagu adalah 39 perwakilan, masing-masing satu orang dari tiap sekolah (9 sekolah di kecamatan Kao Teluk, 20 sekolah di Kecamatan Malifut, 3 sekolah di kecamatan Kao, dan 7 di Kao Barat).

Yang memenuhi undangan pada hari H ini adalah sebanyak perwakilan dari 25 sekolah (beberapa tidak datang karena undangan tidak sampai karena jarak dan transportasi yang tidak mendukung, dan beberapa halangan lainnya). Nara sumber pada acara ini adalah Afrida Ngato sendiri dan juga Dalam Peranginangin mewakili tim peneliti LIPI.

Catatan secara keseluruhan dari pertemuan ini adalah bahwa sosialisasi mata pelajaran bahasa dan budaya Pagu telah berjalan baik seperti yang diharapkan. Semua guru (perwakilan sekolah-sekolah) menerima keputusan pelajaran bahasa daerah dan budaya ini dengan baik dan bersedia mendukungnya. Ada beberapa pertanyaan dan komentar dari para peserta. Beberapa peserta menanyakan soal tenaga pengajar karena selama ini di sekolah mereka belum pernah ada pelajaran bahasa daerah. Tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara atas pertanyaan ini adalah bahwa mereka telah mengadakan program perekrutan guru-guru bahasa daerah di samping merencanakan akan melatih mereka juga (lihat lampiran 1).

Pertanyaan dan komentar yang lain datang dari perwakilan dari SMA Kao Bapak Deki Debeturu yang menyatakan bahwa di sekolahnya pelajaran bahasa dan budaya daerah sudah diajarkan selama beberapa tahun terakhir ini dan pelajaran yang diberikan adalah bahasa Kao. Beliau menanyakan

kenapa bahasa Kao tidak termasuk dalam kelompok bahasa-bahasa daerah yang akan dijadikan mata pelajaran wajib di Kabupaten Halmahera Utara. Tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara untuk pertanyaan ini adalah bahwa mereka mengambil keputusan ini karena adanya kedekatan bahasa Kao dengan Pagu, sehingga bahasa Kao dianggap sebagai dialek bahasa Pagu. Bapak Deki Debeturu memang tidak mengajukan keberatan lebih lanjut, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara menyatakan jika ada pihak sekolah di Kao maupun masyarakat Kao yang dapat mengklarifikasi hal ini langsung dapat disampaikan kepada pemerintah daerah Halmahera Utara.

Perwakilan dari sekolah-sekolah di komunitas Makian<sup>16</sup> semuanya tidak menyuarkan keberatan dengan keputusan ini. Perwakilan dari SMK negeri 3 Halmahera Utara Bapak Mansyur bahkan menyatakan bahwa sekolahnya siap untuk mengirim guru untuk belajar bahasa Pagu untuk dijadikan sebagai pengajar bahasa Pagu.

## **b. Masalah Metode Pembelajaran Bahasa Ibu**

Keberhasilan pengajaran bahasa ibu di sekolah sangat tergantung pada metodenya. Karena bahasa Pagu dalam status terancam punah maka diperlukan metode pembelajaran khusus yang belum ada contohnya. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh Yesaya Ngato maupun Sangaji Pagu (di SD Desa

---

<sup>16</sup>Komunitas Makian adalah transmigran asal pulau Makian di Kecamatan Malifut yang sejak tahun 1985 menghuni sebagian besar wilayah adat Pagu. Kecamatan Malifut terdiri dari 22 desa, Pagu hanya lima desa, sementara Makian 17 desa. Pada konflik horizontal 1999/2000 antara Pagu dan Makian berhadap-hadapan secara langsung.

Sosol) adalah metode yang boleh disebut “sekenanya” dan karena itu sulit diukur keberhasilannya. Secara formal tidak pernah ada upaya pemerintah untuk menggalakkan pengajaran bahasa ibu di sekolah, sehingga tidak mengherankan ketika semangat sudah timbul untuk melestarikan bahasa ibu, hambatan utama yang ada di hadapannya selain tenaga pengajar dan bahan ajar adalah metode pembelajaran. Bahan ajar tidak ada, metode yang efektif belum ditemukan, dan guru yang benar-benar fasih berbahasa ibu jarang ditemukan. Itu semua memerlukan kerja keras dan berdedikasi dari semua yang semestinya terlibat dalam perlindungan dan pembinaan bahasa daerah bersangkutan. Oleh karena itu, menemukan metode pembelajaran merupakan proses eksplorasi dan percobaan atau eksperimen. Dari sini diharapkan dapat ditemukan metode yang paling efektif untuk pengajaran bahasa yang terancam punah. Bahasa dengan status terancam punah memerlukan guru, bahan ajar dan metode yang berbeda dari bahasa yang statusnya sehat. Di bawah ini beberapa gagasan metodik yang ditemukan dalam FGD maupun dalam obrolan dengan pemuka masyarakat Pagu.

- (a) Meneliti sendiri dan mempraktikkannya. Peserta pembelajaran diminta mengumpulkan kata-kata dengan topik tertentu di “lapangan”, mencatat temuan dan mempresentasikan temuannya di depan kelas. Misalnya anak peserta didik diminta untuk melakukan penelitian tentang kata-kata bahasa Pagu dengan topik berkebun. Anak-anak diminta bertanya kepada ibu atau ayah atau anggota keluarga lain yang bisa berbahasa Pagu tentang nama-nama tanaman di kebun, menanam, memelihara tanaman, memetik buah dan seterusnya lalu mencatatnya. Pada hari mata pelajaran bahasa itu anak-anak peserta didik diminta mempresentasikan hasil penelitiannya di depan kelas dengan peraga barang yang mungkin dapat

dibawa ke kelas. Misalnya bibit pohon pala, kelapa, cangkul, dan lain-lain. Minggu berikut peserta didik diminta melakukan hal yang sama dengan topik lain, misalnya nama-nama binatang, nama-nama ikan dan seterusnya. Guru membuat contoh kalimat dari temuan kata-kata anak didiknya.

- (b) Menghafal secara periodik dan kumulatif. Kata-kata yang ditemukan pada proses penelitian dan contoh kalimat harus dihafal. Secara periodik anak-anak peserta didik diminta menghafal sejumlah kata tertentu dan demikian seterusnya sampai akhir tahun ajaran mereka akan menghafal jumlah tertentu kata dan contoh penggunaannya.
- (c) Praktik percakapan. Jika anak didik sudah mengenal banyak kata, dan guru sudah memberi banyak contoh kalimat, maka anak didik diminta untuk melakukan percakapan alamiah di depan kelas, dan guru memberi supervisi. Guru boleh memberi instruksi dengan topik-topik tertentu sebagai subjek percakapan. Misalnya percakapan dua anak tentang apa yang dilakukan pada tiap hari minggu dan hari libur, dan sebagainya.
- (d) Membaca cerita. Membaca cerita tertentu dalam bahasa Pagu misalnya dilakukan di depan kelas, satu persatu. Tentu hal ini diperlukan adanya bahan bacaan cerita dalam bahasa ibu. Dalam keadaan buku semacam itu belum tersedia, guru dapat menulis cerita baik yang bersumber pada cerita rakyat atau dongeng maupun rekaan sendiri barang satu dua halaman. Guru memperhatikan pengucapan, intonasi dan lagu bahasa, dan memberi contoh.
- (e) Belajar berpidato dalam bahasa ibu. Metode ini dipandang paling susah, bukan saja penguasaan bahasa dan kekayaan

kosakatanya yang mungkin masih terbatas, tetapi keberanian tampil serta pilihan topik yang tidak mudah. Metode ini tentu hanya mungkin dilakukan bagi anak-anak peserta didik yang sudah menguasai bahasa ibu.

- (f) Pembiasaan. Anak-anak peserta didik diminta berbicara secara aktif dengan teman-temannya maupun dengan orang di rumah. Guru selalu mengingatkan agar peserta didik membiasakan diri berbicara di rumah dan di lingkungan pergaulan di sekitar mereka dengan bahasa ibu. Untuk mencapai tujuan itu, sebagai latihan, bisa dibuat aturan sekolah di mana guru dan murid pada satu hari dalam sepekan misalnya, diwajibkan untuk berbicara di waktu bebas (di luar mata pelajaran) dengan bahasa ibu. Untuk menjamin aturan tersebut berjalan perlu dibuat sanksi bagi yang melanggar, misalnya membersihkan lantai atau lingkungan sekolah dan seterusnya. Barang siapa yang pada hari yang ditentukan harus berbicara di sekolah dengan teman maupun dengan guru menggunakan bahasa ibu, tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan bahasa ibu, si pelanggar dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan.

Jika diperhatikan gagasan-gagasan yang muncul di atas, pada dasarnya pendidikan bahasa daerah yang terancam punah sebagai muatan lokal harus dilaksanakan dengan metode yang mengutamakan keaktifan dan kreativitas anak didik. Dalam keadaan penutur bahasa ibu relatif sedikit dan status bahasa itu terancam punah, sangat sulit untuk membiasakan bertutur bahasa ibu jika pendidikan bahasa di sekolah disampaikan dengan mengajarkan tata bahasa, struktur kalimat dan hal-hal yang sifatnya teoretik linguistik. Selain harus mempersiapkan penyusunan tata bahasa memerlukan waktu dan tenaga serta keahlian khusus yang memerlukan waktu tidak sedikit.

Sementara menyusun tata bahasa belum selesai, kemerosotan bahasa semakin parah, dan hasilnya belum tentu bisa dipakai untuk memacu ketertinggalan. Mengajarkan bahasa yang sifatnya teoretis mungkin diberikan pada jenjang sekolah menengah atas, ketika peserta didik sudah cukup lancar berbahasa ibu.

#### **4. Semangat Kembali ke Bahasa Ibu dan Implementasinya**

Penelitian bahasa Pagu sudah berjalan tiga tahun (sejak 2011). Tiap tahun peneliti dua kali mengunjungi desa-desa berpenduduk orang Pagu di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Induk dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara. Masing-masing kunjungan lamanya sekitar dua minggu. Peneliti bergaul, bertanya, merekam, percakapan maupun *event* tradisi mereka. Mereka juga bertanya untuk apa semua itu. Mereka tahu bahwa kedatangan peneliti dari LIPI itu tidak membuat masalah, malahan memberikan keuntungan bagi mereka. Keuntungan yang dimaksud adalah kesan dan perasaan mendapat perhatian dan perlindungan, khususnya bahasa dan budaya mereka. Pertemuan-pertemuan antara peneliti dengan masyarakat Pagu melahirkan kesadaran bahwa bahasa mereka dalam keadaan sakit. Tidak jarang peneliti memberi wawasan bahwa bahasa ibu itu penting karena telah melahirkan budaya dan komunitas, serta pembentuk identitas. Pada pertemuan-pertemuan peneliti dengan masyarakat terlontar pula ungkapan untuk memotivasi mereka untuk kembali kepada bahasa ibu, atau menghidupkan kembali bahasa daerahnya sendiri. Ajakan kembali pada bahasanya sendiri itu mendapat sambutan yang bersemangat dari warga Pagu.

Secara kebetulan, kedatangan peneliti LIPI bersamaan dengan munculnya gerakan masyarakat adat yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), bak *tumbu*

*menangi tutup* (ungkapan Jawa secara harfiah berarti bakul ketemu tutupnya, klop). Mereka sedang memotivasi masyarakat adat untuk sadar akan hak-haknya terhadap lingkungan dan pemerintah. Hak-hak apa yang semestinya mereka terima dan kewajiban apa yang mesti mereka lakukan kepada pemerintah, kepada masyarakat dan *stakeholde*, menjadi topik hangat yang mereka sosialisasikan.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada adat tradisi kehidupan keseharian. Identitas masyarakat adat ditengarai oleh bahasa, kebudayaan, tradisi dan latar sejarahnya. Agar masyarakat adat solid, keunikan dan ciri-ciri identitas itu harus ada. Kalau ingin masyarakat adat Pagu diakui, maka ciri-ciri identitas itu harus diperkuat. Mereka sadar bahwa bahasa mereka dalam keadaan sakit. Dengan kata lain, bahasa sebagai ciri identitas yang penting mendapat momentum bagi penegasan dengan gerakan kembali ke bahasa ibu. Bahasa ibu penting dipelajari lagi dan dipraktikkan.

Aktivitas AMAN seperti itu disambut baik oleh masyarakat Pagu. Demikian pula mereka telah termotivasi oleh penelitian bahasa Pagu oleh LIPI. Maka tampak bahwa mereka memiliki semangat yang kuat, sehingga setiap kali pertemuan dengan peneliti ungkapan ingin menghidupkan bahasa ibunya selalu muncul. Tetapi apakah kesadaran dan semangat kembali ke bahasa ibu terimplementasikan dalam bentuk praktik nyata? Masalah ini mendapat perhatian peneliti secara khusus melalui pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Pagu.

Dari pengamatan di lapangan pada kunjungan lapangan bulan April/Mei 2014 diperoleh kesan bahwa semangat tinggallah semangat, tanpa implementasi. Mereka tidak memulai mengajak bicara dengan anak-anak yang masih kecil dengan bahasa Pagu. Padahal mengajak anak-anak kecil dengan bahasa

ibu merupakan transmisi bahasa paling efektif. Di Desa Leleseng, desa Pagu paling pedalaman, percakapan di antara orang dewasa tua maupun muda masih cukup sering menggunakan bahasa Pagu. Tetapi anak-anak usia balita sampai 10-an tahun tidak diajak bicara dengan bahasa ibu. Mereka tidak mendapat pembiasaan berbahasa ibu oleh orang dewasa yang ada di lingkungannya. Di sekolah-sekolah desa Pagu juga tidak diajarkan bahasa ibunya, kecuali yang memang telah dimulai di Desa Sosol. Bahkan Sangaji sendiri mengajak bicara dengan anak-anaknya yang masih kecil menggunakan bahasa Melayu Pasar (Melayu Ternate). Padahal Sangaji selalu mengatakan pada masyarakat Pagu anggotanya agar menghidupkan kembali bahasa ibu dengan membiasakan berbicara dengan bahasa Pagu miliknya sendiri.

## **5. Pencapaian Terkini**

Setelah keputusan Dinas Pendidikan Halmahera Utara bahwa 6 bahasa di Kabupaten Halmahera Utara harus diajarkan di sekolah-sekolah di wilayah bahasa masing-masing, maka tugas selanjutnya bagi setiap komunitas bahasa-bahasa tersebut adalah mengembangkan bahan ajar bahasa mereka masing-masing dengan berpedoman kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Halmahera Utara.

Untuk menunjang program pendidikan bahasa daerah seperti diputuskan oleh Dinas Pendidikan Halmahera Utara itu diperlukan adanya buku bahan ajar. Pengadaan buku bahan ajar bahasa Pagu menjadi masalah pelik, selain karena penelitian LIPI tidak dilanjutkan, biaya untuk itu pun tidak ada, karena pemerintah daerah belum menganggarkannya. Afrida Ngato sebagai Sangaji Pagu dan juga sekaligus pengajar di sekolah dasar di desa Sosol yang mempunyai pengalaman mengajarkan

bahasa daerah Pagu di sekolahnya, mengambil inisiatif untuk mengadakan bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Budaya Pagu untuk semua kelas, mulai dari kelas 1 (SD) hingga kelas 12 (kelas 3 Sekolah Lanjutan Atas). Bahan untuk menyusun buku bahan ajar dapat bersumber pada buku-buku laporan penelitian, dokumentasi dan kamus yang telah disusun oleh tim peneliti LIPI, tetapi untuk mewujudkannya memerlukan waktu dan biaya. Karena dana dari pemerintah daerah untuk pengadaan bahan ajar tersebut belum ada, ia pun mengajukan bantuan dana dari PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) yaitu perusahaan tambang emas milik Newcrest dari Australia dan Persero Aneka Tambang (Antam) yang beroperasi di Gosowong, area yang merupakan wilayah adat masyarakat Pagu, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Bagaimana perencanaan ini berlangsung dan apa hasilnya diuraikan di bawah ini.

Karena 4 tahun proyek pendokumentasian bahasa dan budaya Pagu yang dijalankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berakhir pada akhir 2014, walaupun sudah relatif banyak dokumentasi yang dilakukan (lihat Lampiran 2, "daftar rekaman yang dihasilkan sejak 2012"), pada kenyataannya masih sangat banyak aspek bahasa dan budaya Pagu yang belum direkam untuk dokumentasi dan kajian linguistik. Semakin banyak data yang didapat dan semakin banyak data yang ditranskrip sekaligus dianalisis semakin baik, karena secara kuantitatif akan lebih luas pada cakupan keragaman dan kekayaan bahasa dan budayanya. Untuk memperoleh hasil dokumentasi yang lebih 'luas' itu, masyarakat Pagu menginginkan adanya kegiatan penelitian lebih lanjut, baik untuk pendokumentasian bahasa maupun untuk menuntaskan program revitalisasi bahasa melalui pendidikan bahasa di sekolah-sekolah sebagai muatan lokal. Melalui Sangaji Pagu

diusulkan kegiatan penelitian lanjutan kepada perusahaan tambang emas NHM yang beroperasi di wilayah hutan adat suku Pagu sejak tahun 1997.

Dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati Ir. Hein Namotemo, Sangaji Pagu menyampaikan proposal proyek tersebut di atas dengan menemui langsung Direktur PT. NHM Bapak Terry Pilch di kantor beliau di Gosowong pada tanggal 27 Juni 2014. Proposal ini diterima dan disambut baik oleh Bapak Terry Pilch dan meminta seseorang yang mewakili masyarakat Pagu untuk mempresentasikan metode pendokumentasian dan juga hasil-hasil apa saja yang didapat dari proyek tersebut. Sangaji Pagu kemudian meminta Dalam Peranginangin yaitu salah satu anggota tim peneliti bahasa dan budaya Pagu dari proyek LIPI yang selama proyek berlangsung dari 2012 hingga 2014 ini bertanggung jawab mendokumentasi bahasa dan budaya Pagu untuk mempresentasikan metode yang dipakai dalam proyek pendokumentasian dan produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan dari pekerjaan tersebut.

Pada 9 Agustus 2014, Dalam Peranginangin, disertai Afrida Ngato sebagai Sangaji atau kepala suku masyarakat adat Pagu dan Yusak Ngato mewakili pemuda adat Pagu memenuhi undangan presentasi di kantor *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. NHM di Gosowong. CSR PT. NHM (badan khusus yang menangani segala kebutuhan pertanggung-jawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar tambang) diwakili oleh Manajer CSR PT. NHM sendiri yaitu Bapak Swingly Kalimbe yang didampingi oleh tiga orang stafnya. Pada kesempatan ini Dalam Peranginangin menyampaikan dalam presentasinya pentingnya mendokumentasikan bahasa dan budaya Pagu,

metode apa yang digunakan dan hasil apa saja yang akan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini.

Presentasi tersebut berisi kegiatan yang sudah dilakukan oleh LIPI selama 4 tahun, dan rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk menutupi kekurangannya agar revitalisasi bahasa Pagu yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dibutuhkan penelitian selama 4 tahun lagi untuk menambahkan data dokumentasi bahasa dan budaya Pagu yang sudah dikumpulkan selama ini. Metode yang akan digunakan dalam proyek yang diusulkan juga metode yang sama dipakai dalam pendokumentasian bahasa dan budaya Pagu yang dilaksanakan oleh LIPI, yaitu perekaman, transkripsi dengan menggunakan program ELAN, analisis linguistik di *Toolbox* dan sebagainya. Hasil yang diharapkan dari pendokumentasian ini di antaranya adalah rekaman (baik audio maupun video) yang ditranskrip dalam ELAN dengan kelengkapan fitur-fitur linguistik seperti simbol fonetik dan penempatan tanda 'stress' (penekanan pada suku kata) dan lain-lain. Semua data ini direncanakan disimpan dengan baik dengan teknologi penyimpanan yang canggih hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan pada pusat Archive yang ditawarkan di beberapa universitas dunia seperti ELAR (di London), PARADISEC (di Sydney) ataupun LELA (di Leipzig). Proyek tambahan ini juga diharapkan akan menghasilkan kamus bahasa Pagu-Indonesia-Inggris yang lebih lengkap, dengan target minimal 20.000 entri, di samping buku bahan ajar untuk semua kelas SD. Buku bahan ajar bahasa dan budaya Pagu akan menjadi target utama untuk semester pertama proyek ini, karena merupakan tuntutan dari dikeluarkannya keputusan pemerintah setempat untuk mengadakan bahan ajar mata pelajaran wajib bahasa daerah, termasuk bahasa dan budaya Pagu.

Jumlah dana yang diusulkan untuk proyek 4 tahun ke depan ini adalah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Jumlah itu dianggap mendanai untuk mendanai seluruh kegiatan proyek ini, termasuk pengadaan kantor, perlengkapan kantor, termasuk komputer masing-masing staf, upah bulanan bagi staf yang terlibat, pembuatan buku bahan ajar, kamus dan lain-lain, serta pembuatan website proyek.

Pihak CSR PT. NHM yang diwakili oleh manajer CSR Bapak Swingly Kalimbe menanggapi proposal proyek dokumentasi bahasa dan budaya Pagu untuk jangka 4 tahun ke depan ini dengan sangat antusias. Komitmen untuk membantu proyek ini telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*MOU Memorandum of Understanding*) antara pihak CSR PT. NHM, Kepala Suku Pagu dan Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditandatangani pada 25 September 2014. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri oleh beberapa wartawan lokal maupun nasional untuk memberitakan contoh kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat adat dan perusahaan yang wilayah kerjanya berada pada wilayah masyarakat adat (dalam hal ini wilayah adat suku Pagu). Dari kacamata AMAN momen ini dapat dianggap sebagai pengakuan pemerintah dan swasta (dalam hal ini PT. NHM) terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat, budaya dan bahasanya.

## **6. Perencanaan Proyek 4 Tahun**

Salah seorang peneliti bahasa Pagu, Dalan Peranginangin, mendapat mandat dari kepala suku Pagu, Afrida Erna Ngato, menjadi penanggungjawab atas pelaksanaan proyek lanjutan 4 tahun ke depan ini. Dipilihnya Dalan Peranginangin atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah berpengalaman menjadi penanggungjawab kegiatan pendokumentasian dalam

Proyek LIPI selama 4 tahun sebelumnya. Dikarenakan Dalam Peranginangin harus memenuhi tanggung-jawab lain sebagai mahasiswa S3<sup>17</sup> di departemen Linguistik di Universitas Hong Kong di Hong Kong yang akan ditempuh selama tiga tahun ke depan mulai dari semester pertama 2014-2015 di bulan September hingga September 2017, maka tidak mungkin untuknya mendampingi proyek baru ini secara langsung. Oleh karena kondisi ini, Dalam Peranginangin telah meminta rekan kerjanya yang juga sudah berpengalaman belasan tahun dalam pendokumentasian bahasa dengan menggunakan metode yang serupa dari kantor Jakarta Field Station Max Planck Institute, yaitu Erni Farida Ginting MA untuk mengkoordinasi proyek baru ini dari dekat. Di samping itu, Dalam juga telah meminta seorang dari kantor yang sama yang berpengalaman dengan perangkat komputer dan program-program pendokumentasian yaitu Vittorio Heru untuk juga mendampingi proyek ini. Dalam Peranginangin akan memantau segala perkembangan melalui laporan Ibu Erni dan Bapak Vittorio. Ia merencanakan minimal satu tahun sekali (di saat liburan tahunan) melihat perkembangan proyek ini. Selama menempuh program S3 ia juga mendapat kesempatan

---

<sup>17</sup> Data hasil penelitian LIPI selama 4 tahun dimanfaatkan oleh salah seorang penelitinya, Dalam Peranginangin untuk menyusun proposal disertasi dalam rangka studi jenjang S3 yang ia ajukan kepada Departemen Linguistik Universitas Hongkong. Pada saat laporan ini ditulis, yang bersangkutan telah dinyatakan diterima, dan telah berangkat ke Hongkong dan memulai studinya. Proyek S3 yang ia kerjakan adalah tentang bahasa Pagu, khususnya "*Language Contact*" (Kontak bahasa) yaitu bagaimana struktur dan leksikon bahasa Pagu yang digunakan oleh penutur Pagu sekarang ini telah dipengaruhi oleh bahasa Lingua Franca yaitu bahasa Melayu Lokal yang digunakan seluruh masyarakat Halmahera (Maluku Utara) sebagai bahasa pengantar antar suku yang berbeda.

dari Universitas Hongkong selama satu semester untuk bekerja di lapangan dalam bentuk “*field trip*” yang dapat dimanfaatkan untuk menangani proyek ini.

Tahap pertama pelaksanaan proyek baru ini adalah pengadaan kantor dan perangkat kerja. Kantor proyek akan diadakan di desa Sosol dengan mengontrak rumah permanen penduduk. Perangkat kerja termasuk komputer, internet, meja kursi dan segala keperluan lain akan menjadi tanggung jawab Vittorio. Tahap kedua adalah merekrut staf yang bertanggung jawab untuk mentranskripsi rekaman dengan menggunakan ELAN dan staf keuangan dan administrasi. Direncanakan akan direkrut 4 staf untuk tugas transkripsi dan 1 orang lagi untuk bagian keuangan sekaligus administrasi. Dalam tahap kedua ini Erni Farida Ginting akan bertanggung jawab melatih pemuda Pagu bisa berbahasa Pagu dan bisa menggunakan komputer bagaimana cara menggunakan ELAN.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan proyek dan pemantauan. Semua staf akan melapor ke Erni Farida sebagai koordinator yang nantinya akan melapor ke Dalan Peranganingin sebagai koordinator. Selain itu, proyek juga akan melapor ke CST PT. NHM sebagai penyandang dana, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, dan juga LIPI sebagai ‘organisasi Induk’ yang telah memulai dan memungkinkan proyek baru ini diteruskan.



---

---

## **BAB IV**

---

---

### **P E N U T U P**

**D**ari temuan-temuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menghidupkan kembali bahasa Pagu yang terancam punah adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ada faktor-faktor eksternal maupun internal yang mendesak dan mengkooptasi kondisi masyarakat sehingga gairah menghidupkan kembali bahasa ibu yang terancam punah itu tidak mudah diimplementasikan. Kelihatannya harapan terakhir adalah pengajaran bahasa ibu sebagai muatan lokal di sekolah. Di sekolah bahasa ibu dapat dijadikan pengantar pembelajaran pada awal pendidikan, kelas satu sampai kelas tiga sekolah dasar. Kebijakan pemerintah sudah ada, sekurang-kurangnya sampai tingkat provinsi, tetapi di tingkat kabupaten belum ada. Di tingkat inilah diharapkan bisa dirumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan yang lebih tepat, karena level bawahlah yang paling tahu kondisi lapangan dan akar rumput masyarakatnya. Harapan untuk ini kiranya menghadapi lampu hijau dengan adanya rapat perencanaan di Dinas Pendidikan Halmahera Utara 14 Mei 2014, yang melibatkan pelaku pendidikan dan kelompok etnik pemilik bahasa yang terancam punah.

Bersamaan waktunya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh LIPI di masyarakat Pagu, tengah berlangsung pula gerakan penyadaran masyarakat adat yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Gerakan masyarakat adat itu semakin intensif manakala Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi oleh AMAN dan beberapa lembaga lainnya atas UU No. 41, 1999 tentang kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Mei 2013

menyatakan bahwa hutan adat itu bukan hutan Negara. Masyarakat adat memiliki hak atas wilayah dan hutan mereka yang selama ini diklaim sebagai hutan Negara. Sejak itu AMAN mulai mensosialisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara intensif kepada masyarakat adat. AMAN bekerja sama dengan kepala suku atau sangaji, memasyarakatkan keputusan MK itu. Di Kabupaten Halmahera Utara Sangaji Pagu yang telah menerima kehadiran peneliti LIPI dan mendukung pelestarian bahasa ibu mereka memanfaatkan sosialisasi itu untuk menyadarkan masyarakat adatnya bahwa pelestarian bahasa ibu sangat penting bagi memelihara identitas kesukuan mereka. Dalam masyarakat Pagu, kebetulan berlaku masyarakat etnik identik dengan masyarakat adat. Identitas masyarakat adat ditengarai adanya satuan wilayah tertentu, bahasa, tradisi, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Bahasa merupakan penanda identitas paling mudah dikenali oleh orang maupun komunitas lain. Karena itu melestarikan bahasa merupakan wahana menegaskan identitas masyarakat adat, karena hak atas hutan adat diberikan kepada masyarakat adat harus disertai identitas yang jelas.

Penting pula dicatat, rangkaian FGD yang dilakukan oleh tim peneliti LIPI dengan pemerintah daerah, DPRD tingkat 2, masyarakat kampus dan LSM sejak tahun pertama hingga tahun keempat juga mencatat kemajuan yang sangat berarti. Dari pemerintah daerah yang pada mulanya sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap bahasa yang terancam punah yang ada di wilayahnya, berubah menjadi memberikan perhatian serius. Tahun 2013, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<sup>18</sup> telah memulai merintis program

---

<sup>18</sup> Dinas ini membuat program bahasa dalam rangka pengembangan kebudayaan. Agaknya Dinas Kebudayaan dan

yang diberi nama "Menutur dan Menulis Adat Budaya." Terkait program tersebut telah direkrut 16 orang guru pensiun untuk pengajar bahasa daerah. Perekrutan tenaga pengajar tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 430/021/2013 Tentang Pembentukan Tenaga Pengajar Bahasa Daerah di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013. Setidaknya ada dua hal yang mendasari terbitnya Surat Keputusan ini, yaitu: (1) bahwa dalam rangka pengembangan budaya daerah khususnya bahasa daerah di Kabupaten Halmahera Utara, maka diperlukan pembentukan tenaga pengajar sebagai wujud proses pelestarian Bahasa Daerah; (2) bahwa tenaga pengajar merupakan guru tokoh adat yang memahami eksistensi budaya dan Bahasa Daerah sesuai etnis masing-masing seperti Bahasa Galela, Tobelo, Pagu dan Modole.

FGD yang dilakukan dengan Pemda dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara di bulan April 2014 berdampak positif terhadap kebijakan pendidikan bahasa daerah itu. Tidak berapa lama setelah FGD diadakan, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Utara menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat bersama segenap guru-guru bahasa dan petinggi adat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Pertemuan yang diikuti oleh 18 orang yang terdiri dari guru-guru bahasa dan pemangku adat Modole, Galela, Loloda, Pagu dan Tobelo mengambil keputusan pentingnya bahasa daerah diajarkan di sekolah dari tingkat SD sampai SLTA sebagai muatan lokal.

Dengan demikian, antara penelitian LIPI, pemerintah daerah, masyarakat adat dengan sangajinya dan AMAN menemukan titik singgung yang sangat kuat dalam rangka

---

Pariwisata lebih dulu merespons penelitian LIPI dari pada Dinas Pendidikan.

pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah. Jika ada empat pihak saling bertemu dalam satu kepentingan dapat dipastikan menimbulkan optimisme untuk berjalannya program-program “penyelamatan” bahasa yang terancam punah. Walaupun LIPI tidak dapat melakukan pendampingan atas keberlangsungan pelestarian bahasa yang telah diteliti dan keberlangsungan semangat masyarakat penutur, dengan adanya tambahan program 4 tahun ke depan yang dibiayai oleh NHM dapat mengantarkan cita-cita menyelamatkan bahasa Pagu ke dalam kenyataan.

## DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

- Arka, I Wayan. 2011. "Kompleksitas Pemertahanan dan Revitalisasi Bahasa Minoritas di Indonesia: Pengalaman Proyek", dalam *Majalah Indonesia*, edisi XXXVIII. No. 1. Hlm. 33–51.
- Aswandikari. 1996. *Problematik Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Sastra Sasak di Sekolah Dasar Sepulau Lombok NTB dan Usaha Pemecahannya*, Laporan penelitian. Lombok: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.
- Bogiri, Hanan Vari. 2010. "Preserving and Promoting Indigenous Languages in Vanuatu: Possibilities and Constraints" dalam Margaret Florey (ed.), *Endangered Languages of Austronesia*. Oxford University Press. Pp. 173-186.
- Bowden, J. 2002. "The Impact of Malay on Taba: A Type of incipient language death or incipient death of a language type?" dalam, Bradley D and Bradley M (eds) *Language Endangerment and Language Maintenance*. Routledge Curzon. Hlm. 114–143.
- Carder, S. Pit, 1975. *Introducing Applied Linguistics*. Great Britain: Hazel Waston and Veey.
- Crystal, D. 2000. *Language Death*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Dulay, Heidi, Merina Burt, dan Stephen Krashen, 1982, *Language Two*. Oxford: Oxford University.
- Dundes, Alan. 1975. "On the structure of the proverb". *Proverbium*, No. 25: 961-973.

- Ellis, Rod. 1995. *The Study of Second Language Aquisition*. New York: Oxford University.
- Fishman, Joshua A. (ed.) 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Foley, W., 1997, *Anthropological Linguistics: an introduction*. Oxford: Basil Blackwell
- Freire, Paulo, 1977. *Pedagogy of The Oppressed*, New Zealand, Penguin Books.
- Haarman, H. 1990. "Language Planning in the light of a general theory or Language: a methodological framework." dalam *International Journal of the Sociology of Language* 86: 103-26.
- Hinton, Leanna, "Revitalization of Endangered Languages" dalam Peter K. Austin and
- Salabank, Julia (eds.) *The Cambridge Handbook of Endangered Languages*. Cambridge University Press, hlm. 291-312.
- Hisyam, Muhamad (ed.). 2012. *Vitalitas Bahasa Pagu*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- (ed.) 2011, *Masyarakat Pagu, Budaya dan Bahasanya*, Jakarta: LIPI Press.
- Ibrahim, Gufran Ali. 2009. *Metamorfosa Sosial dan Kepunahan Bahasa*. Ternate: Lembaga Penerbitan Universitas Khairun.
- Kaplan B., Robert, and Richard B. Baldauf Jr. 1997. *Language Planning from Practice to Theory*. Clevedon: Multilingual Matters ltd.
- Lauder, Multamia RMT., and Ayatrohaedi, 2006, "The Distribution of Austronesian and Non-Austronesian

Languages in Indonesia: Evidence and Issues” in Truman Simanjuntak, Ingrid H.E. Pojoh, Muhamad Hisyam (eds.), *Austronesian Diaspora And The Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago*. Jakarta: LIPI Press. (349-360).

Lauder, Multamia R.M.T, 2011, “Pengelolaan dan Pemberdayaan Bahasa-bahasa yang Berpotensi Terancam Punah” disajikan pada Seminar “Pengembangan dan Perlindungan Bahasa-Kebudayaan Etnik Minoritas untuk Penguatan Bangsa, 15 Desember 2011, Jakarta: Widyagraha LIPI.

Patji, Abdul Rachman, 2013. Policy Paper, *Pemertahanan Bahasa Kebudayaan Etnik Yang Hampir Punah dalam Konteks Lokal*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

----- 2012, Policy Paper, *Bahasa dan Kebudayaan Etnik Minoritas: Vitalitas dan Kemungkinan Pemertahanannya*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Rachman, Arif, 2006, “The Role of Education in Protecting and Saving Endangered Languages” dalam Truman Simanjuntak, Ingrid H.E. Pojoh, Muhamad Hisyam (eds.), *Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago*. Jakarta: LIPI Press. (349-360).

Rubin, J. and B. H. Jernudd (eds.) 1971. *Can Language be Planned?* Honolulu: East-West Center.

Salabank, Julia. 2011. *Language Policy for endangered languages*. dalam Austin, P. and Sallabank, J. (eds.), *The Cambridge Handbook of Endangered Languages*. New York: Cambridge University Press.

- Schiffman, H. F. 1996. *Linguistics Culture and Language Policy*. London: Routledge.
- Sasse, H. 1992. "Theory of language death".dalam Matthias Brenzinger (ed). *Language death: Factual and theoretical explorations with special reference to East Africa*. Berlin & New York: Mouton De Gruyter. Hlm.(7–30).
- Siahaan, Rumondang, 2002. *Kajian Kasus Tentang Tingkat Pemertahanan Bahasa pada Masyarakat Batak Toba di Medan Berdasarkan Perilaku Pilih Bahasa*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Siregar, Bahren Umar, dkk. 1998. *Pemertahanan Bahasa dan Sikap Bahasa: Kasus Masyarakat Bilingual di Medan*, Jakarta: Depdikbud.
- Syairuddin, Nurhayat, 2012. "Dulu, Kini, dan Masa Depan Bahasa Mamuju," dalam Prof. Dr. Masao Yamaguchi, *Aspek-aspek Bahasa Daerah di Sulawesi Bagian Selatan*, Kyoto: Hokuto Publishing Inc.
- Spolsky, B. 2004. *Language Policy*. Cambridge University Press.
- Sudirman, 1992. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugono, Dendy, 2010, "Pemertahanan Bahasa Nusantara, Dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Global" Makalah Seminar Nasional Bahasa, Universitas Diponegoro, Semarang 6 Mei 2010.
- Thung, Ju Lan. 2011, Executive Report, *Pencegahan Kepunahan Bahasa Minoritas Non-Austronesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Todd, L, 1984. "Language Options for Education in Multilingual Society", dalam Kennedy, (ed.), *Language Planning and Language Education*, London: George Allen and Unwin.
- Todorov, Tzvetan, 1983, *Symbolism and Intrepretation*, translated by Catherine Porter, Routledge, & Kegan Paul, London.
- Wengkang, Thelma Ivonne Maria, 1993. *Tesis*. "Pemilihan Bahasa Daerah untuk Diajarkan pada Pendidikan Dasar di Kawasan Multilingual Daerah Minahasa," Bandung, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Wimbish, Sandra G. 1991. "An Introduction to Pagu through the analysis of narrative discourse" MA thesis, University of Texas at Arlington.
- , 1992, "Pagu Phonology" dalam Donald A. Burquest and Wyn D. Laidig (eds.) *Descriptive Studies in Languages of Maluku*, NUSA, Linguistic Studies of Indonesia, and Other Languages in Indonesia, Vol. 34. Hlm. 69–90.
- Wurm, S. 1991. "Language death and disappearance: Causes and Circumstances." dalam Robins and Uhlenbeck (eds). hlm. 1–8.
- Wurm, A. W. (2002). Strategies for Language Maintenance and Revival. dalam Bradley, D dan Bradley, M. (eds). *Language Endangerment and Language Maintenance*. Routledge: Curzon, hlm. 11–23.

## URL

[http//www/Analisdally.com](http://www/Analisdally.com) diakses 22 Mei 2012

<http://www.crayonpedia.org> Dinamika\_Penduduk\_8.1\_Sanusi\_  
Fatah, diakses 14 Agustus 2012

[http:// www.lat-mpi.e /tools/elan /](http://www.lat-mpi.e/tools/elan/)

[http: // www.sil.org/computing/toolbox/index.htm.](http://www.sil.org/computing/toolbox/index.htm)

<http://www.halimaherautara.com>

<http://www.dikpora-sangihe.com/>

<http://contoh-makalah-mahasiswa.blogspot.com/>

**L A M P I R A N**



## **Lampiran 1**

### **Bahan Rapat Mulok Bahasa Daerah 14 Mei 2014 di Tobelo**

#### **A. Latar Belakang**

Muatan local sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan bahwa muatan local merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi serta keunikan local, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang lain.

Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosof ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir nasional dan kecermelangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa kebudayaannya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interkasi social di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

Pelajaran muatan local diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatannya, agar peserta didik mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, social dan budayanya, memiliki bekal kemampuan dan ketrampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, memiliki sikap dan prilaku yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya setempat melalui pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresikan/berkreasi dan berapresiasi melalui

#### **B. Landasan**

1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2)  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

### **C. Tujuan**

Mata pelajaran muatan local bahasa daerah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis
2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu antar suku daerah dalam wilayah kabupaten Halmahera Utara
3. Menikmati dan memanfaatkan nilai etika, sopan santun, budaya dan seni yang terkandung dalam bahasa daerah untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa daerah.
4. Menghargai dan membanggakan sastra daerah sebagai khazanah budaya.
5. Memahami nilai-nilai budaya Halmahera melalui bahasa daerah.
6. Menampilkan budaya daerah, kesenian daerah dan ketrampilan daerah baik di tingkat local, regional maupun global
7. Melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya nusantara.

### **D. Komponen**

Komponen mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah meliputi:

1. Linguistik
  - A. Unsur inti terdiri:
    1. Tata bunyi bahasa (Fonologi)
    2. Tata bentuk kata (Morfologi)
    3. Tata Kalimat (Sintaksis)
  - B. Unsur penunjang terdiri:
    1. Asal usul kata (Etimologi)
    2. Makna kata asal (Leksikologi)
    3. Perkembangan makna kata (Simantik)
- II. Kesusastraan
  1. Teori
  2. Sejarah
  3. Apresiasi

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Daerah sesuai komponen di atas mencakup ketrampilan berbahasa:

1. Mendengarkan
2. Berbicara
3. Membaca
4. Menulis

#### D. Peta penggunaan bahasa daerah

Di Kabupaten Halmahera Utara

No.	Kecamatan	Desa	Bahasa Daerah	Sekolah
1.	Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat	Wari, Buae, MKDM, Gura, Gamsungi, Gosoma, WKO, Wosia, Pitu, Linaino, ... sampai Tobe	Tobelo	
2.	Galela, Galela Selatan, Galela Barat, Galela Utara	Semua desa di wilayah Galela	Galela	
3.	Loloda Utara dan Loloda Kepulauan	Semua desa di wilayah Loloda	Loloda	
4.	Kao		Kao	
5.	Kao Barat, Malifut, Kao		Pagu	
6.	Kao Barat		Modole	
7.	Kao Barat		Boing	

#### E. Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup

Tingkat Kompetensi	Tingkat/ kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
1.	I-II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kepedulian, rasa percaya diri, perilaku santun, sikap kasih sayang, kedisiplinan tanggung jawab, menghargai, bangga dan memiliki rasa cinta dalam menggunakan bahasa daerah</li> <li>• Mengenal konteks seni, budaya dan social melalui kebahasaan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk dan ciri teks factual (deskriptif, petunjuk rarahan, laporan sederhana), teks tanggapan (ucapan terima kasih, permintaan maaf, diagram/table), teks cerita (narasi sederhana, puisi) teks cerita non naratif (cerita</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat/ klas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		<p>serta unsure lingustik dalam penyajian teks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan secara lisan dan tulis berbagai teks sederhana</li> </ul>	<p>diri/personal, buku harian)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konteks seni, budaya, norma, serta konteks social yang melatarbelakangi lahirnya jenis teks</li> <li>• Paralinguistik (lafal, kelamangan, intonasi, tempo gesture, dan mimic)</li> <li>• Satuan bahasa pembentuk teks kalimat sederhana dua kata pola SP</li> </ul>
2.	III-IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kepedulian, rasa percaya diri, perilaku santun, sikap kasih sayang, kedisiplinan tanggung jawab, menghargai, bangga dan memiliki rasa cinta dalam menggunakan bahasa daerah</li> <li>• Mengenal konteks seni, budaya dan social melalui kebahasaan, serta unsure paralingustik dalam penyajian teks</li> <li>• Mengenal bentuk dan cirri teks berbagai teks sederhana</li> <li>• Menganalisis informasi di dalam berbagai teks sederhana</li> <li>• Menyajikan berbatgai teks sederhana secara lisan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk dan cirri teks factual (deskriptif, petunjuk arahan, laporan sederhana), teks tanggapan (ucapan terima kasih, permintaan maaf, diagram/label), teks cerita narasi sederhana, puisi) teks cerita non naratif (cerita diri/personal, buku harian)</li> <li>• Konteks seni, budaya, norma serta konteks social yang melatarbelakangi lahirnya jenis teks</li> <li>• Paralinguistik (lafal, kelantangan, intonasi, tempo gesture, dan mimic)</li> <li>• Satuan bahasa</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat/ kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun berbagai teks sederhana secara tulis</li> </ul>	<p>pembentuk teks: kalimat sederhana dua kata pola SP</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kepedulian, rasa percaya diri, perilaku santun, sikap kasih sayang, kedisiplinan tanggung jawab, menghargai, bangga dan memiliki rasa cinta dalam menggunakan bahasa daerah</li> <li>Mengenal konteks seni, budaya dan social melalui kebahasaan, serta unsure paralingustik dalam penyajian teks</li> <li>Mengenal bentuk dan cirri teks berbagai teks sederhana</li> <li>Menganalisis informasi di dalam berbagai teks sederhana</li> <li>Menyajikan berbagai teks sederhana secara lisan</li> <li>Menyusun berbagai teks sederhana secara tulis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk dan ciri teks genre factual (teks laporan buku, laporan investigasi, teks penjelasan tentang proses, teks paparan iklan, genre cerita (teks narasi sejarah, teks pantun, dan syair), dan genre tanggapan (pidato persuasive, ulasan buku, teks paparan, teks penjelasan).</li> <li>Konteks seni, budaya, norma, serta konteks social yang melatarbelakangi lahirnya jenis teks</li> <li>Satuan bahasa pembentuk teks: kalimat sederhana, pola SPPel, SPOPel, SPOPelk, kata, frase, pilihan kata, diksi</li> <li>Penanda kebahasaan dalam teks</li> <li>Paralinguistik (lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gesture, dan mimic)</li> </ul>

### Kelas I Semester I

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar



## Lampiran 2:

### Daftar Rekaman yang Dihasilkan Sejak April 2012

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
1	PAG-20120415	15/04/2012	Conversation	having a conversation in the living room.	0:59:53
2	PAG-20120422	22/04/2012	Conversation	having a conversation in the living room; talking about life in the old era.	0:19:04
3	PAG-20120716	17/07/2012	Conversation	having a conversation in the living room.	0:21:31
4	PAG-20120718-A	18/07/2012	Conversation	having a conversation in the living room of Ida Baici.	0:21:12
5	PAG-20120718-B	18/07/2012	Conversation	having a conversation in the living room of Ida Baici.	0:15:19
6	PAG-20120719-A	19/07/2012	Conversation	having a conversation in the living room of Kefas Lada.	0:49:09
7	PAG-20120730	30/07/2012	Conversation	having a conversation at the bridge in Gayok village.	0:38:07
8	PAG-20120719-B	19/07/2012	Conversation/ ritual	practicing a ritual of welcoming a special guest, in the living room of Kefas Lada.	0:04:47
9	PAG-20120724	24/07/2012	Conversation/ ritual	having a conversation about the ritual of bathing baby in the living room of Kefas Lada.	0:21:44
10	PAG-20120729	29/07/2012	Ethnic songs	singing some Pagu ethnic songs	0:20:09

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
11	PAG-20120730-A	30/07/2012	Monolog/ story telling	telling a folktale about a friendship between a mouse and a fish.	0:09:34
12	PAG-20120730-B	30/07/2012	Conversation/ story telling	two speakers telling a ghost story; one becomes a human and the other becomes a ghost; the ghost that is in the form of a human keeps asking the human questions, until he bursts into a laughter that turn himself into his real form.	0:02:44
13	PAG-20120731-A	31/07/2012	Monolog/ story telling	telling a story of why a certain clan of Pagu cannot live in Gayok village.	0:02:40
14	PAG-20120731-B	31/07/2012	Monolog/ story telling	telling a story about a conflict between two relatives in Gayok.	0:08:41
15	PAG-20120731-C	31/07/2012	Monolog/ story telling	telling a story about himself being bitten by a crocodile.	0:01:39
16	PAG-20120731-D	31/07/2012	Conversation/ story telling	a granddaughter asking her grandfather of how a crocodile bit him on the back.	0:02:44
17	PAG-20120802-A	2/08/2012	Monolog/ story telling	talking about the female traditional clothing that she's wearing.	0:03:51
18	PAG-20120802-B	2/08/2012	Monolog	talking about the female traditional clothing that she's wearing.	0:10:31

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
19	PAG-20130521	21/05/2013	Conversation	talking about how to maintain the Pagu language in front of the speakers' house	0:04:55
20	PAG-20130523-A	23/05/2013	Conversation	Ida Ngato is dropping by at a woman's house who is cleansing palm leaf ribs from their leaves.	0:09:06
21	PAG-20130519	19/05/2013	Conversation	Ida Ngato is visiting her uncle in his home in Balisosang village	0:07:46
22	PAG-20130523-B	23/05/2013	Conversation	conversation between three women at the river bank while waiting for Samuel Woyo the owner of the boat is going to take them downstream.	0:04:51
23	PAG-20130523-C	23/05/2013	Monolog	Ida Ngato is delivering speech after her coronation as the leader of the Pagu tribe, bringing the title as Sangaji.	0:05:01
24	PAG-20130526	26/05/2013	Singing in a group	singing a Pagu song at the beach	0:04:53
25	PAG-20130628-A	28/06/2013	Conversation	Ida Ngato is having conversation with some people at a hut who are working in their sago field in the jungle near Gayok Tua village.	0:08:31

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
26	PAG-20130628-B	28/06/2013	Conversation	Ida Ngato is having conversation with some people at a hut who are working in their sago field in the jungle near Gayok Tua village	0:05:27
27	PAG-20130628-C	28/06/2013	Conversation	Ida Ngato is having conversation with some people at a hut who are working in their sago field in the jungle near Gayok Tua village	0:03:01
28	PAG-20130628-D	28/06/2013	Conversation	Ida Ngato is having conversation with some people at a hut who are working in their sago field in the jungle near Gayok Tua village	0:28:52
	PAG-20130628-E	28/06/2013	Conversation	conversations between 10 people (including Dalan) in a boat on its way from the sago field in the jungle to Gayok village that takes normally 3 hour long trip (the boat machine is being turned off because of going through a narrow body of the stream; the time in which the recording is taken).	0:22:35

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
30	PAG-20130628-F	28/06/2013	Conversation	Ida Ngato is having conversation with some people while cooking for her lunch at the hut in the field	0:02:39
31	PAG-20130628-G	28/06/2013	Conversation	Ida Ngato is having a conversation with a lady from Gayok while cooking for their lunch at the hut in the field.	0:04:31
32	PAG-20130628-H	28/06/2013	Conversation	conversations between 10 people (including Dalan) in a boat on its way from the sago field in the jungle to Gayok village that takes normally 3 hour long trip (the boat machine is being turned off because of going through a long narrow body of the stream; the time in which the recording is taken).	0:02:36
33	PAG-20130628-I	28/06/2013	Conversation	conversations in a house in Gayok after the ten people arrived in the village; they are dividing their shares of plenty of sago worms they got from the field in Gayok Tua.	0:04:34

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
34	PAG-20130629-A	29/06/2013	Monolog/ story telling	Keliopas Badiri is telling a story about a friendship between a turtle and a monkey.	0:11:19
35	PAG-20130629-B	29/06/2013	Monolog/ story telling	Keliopas Badiri is telling a ghost story.	0:11:48
36	PAG-20130629-C	29/06/2013	Monolog/ story telling	Keliopas Badiri is telling a story about a king and Abu Nawas	0:13:10
37	PAG-20130630-A	30/06/2013	Monolog/ story telling	Ayub Karim is telling a story about the independence war against the Dutch in Kao.	0:13:48
38	PAG-20130630-B	30/06/2013	Monolog/ story telling	Jabir Usman is telling a story about a misunderstanding between people when one was using Pagu while the other local Malay.	0:04:28
39	PAG-20130630-C	30/06/2013	Monolog/ story telling	Jabir Usman is telling a story about selling frogs.	0:05:29
40	PAG-20130630-D	30/06/2013	Monolog/ story telling	Jabir Usman is telling the rule of the traditional Pagu of what to do and what not to do when passing someone else's field.	0:03:11
41	PAG-20130702	2/07/2013	Conversation	Ida Ngato is having conversation with some people at the back of Samuel Woyo's house while pounding padi.	0:21:19

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
42	PAG-20130702-A	2/07/2013	Monolog/ story telling	Samuel Woyo is telling a story about a father who lost his baby because it had been distined so.	0:07:17
43	PAG-20130702-B	2/07/2013	Monolog/ story telling	Samuel Woyo is telling a story about a man who only got a half body (only left/right side) making a travel to the heaven.	0:07:21
44	PAG-20130702-C	2/07/2013	Monolog/ story telling	Samuel Woyo is telling a story about a friendship between an egret and a dog.	0:04:06
45	PAG-20130702-D	2/07/2013	Monolog/ story telling	Jabir Usman is telling a story (legend) about a friendship between a man and a crocodile.	0:24:22
46	PAG-20130702-E	2/07/2013	Monolog/ story telling	Jabir Usman is telling a story about a love relationship between a young man and a girl.	0:12:20
47	PAG-20140427-A	27/04/2014	Monolog/ story telling	Kaleopas Badiri is telling a history that some of Pagu people were actually coming from Sahu, a community in West Halmahera	0:11:56
48	PAG-20140427-B	27/04/2014	Monolog/ story telling	Kaleopas Badiri is explaining about the difference between Isam and Pagu; while the former refers to the people, the latter to its territory.	0:08:46

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
49	PAG-20140428-A	28/04/2014	Conversation/ story telling	Belt Lopa is telling Ida Ngato about a war strategy in a war between king from the east and the king from the west.	0:12:17
50	PAG-20140428-B	28/04/2014	Conversation/ story telling	Belt Lopa is telling Ida Ngato about his experience of going with a linguist from US to fish in the sea.	0:08:54
51	PAG-20140428-C	28/04/2014	Conversation/ story telling	Belt Lopa is telling Ida Ngato a story about the youngest of 7 siblings who married a snake.	0:06:55
52	PAG-20140428-D	28/04/2014	Conversation/ story telling	Belt Lopa is telling Ida Ngato a story about the Sultan's well.	0:06:18
53	PAG-20140501-A	1/05/2014	Conversation/ story telling	Mongke Igobula is telling a history about the clash between Pagu and Modole people in the past.	0:06:44
54	PAG-20140501-B	1/05/2014	Conversation/ story telling	Mongke Igobula is telling a legend of why the star in the east and the star in the west never meets each other.	0:04:45
55	PAG-20140501-C	1/05/2014	Conversation/ story telling	Mongke Igobula is telling a story about a sacred spot in Sosol named <i>o Jin ma wola</i> (lit. the house of jin).	0:05:42

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
56	PAG-20140503-A	3/05/2014	Conversation/ story telling	Lewi Bajuli and his brother Yulianus Bajuli are telling the legends of how some Pagu sacred spots were created.	0:16:37
57	PAG-20140503-B	3/05/2014	Conversation/ story telling	Lewi Bajuli's wife is telling Ida Ngato the legend of a woman who turned into a rock after feeding a dog.	0:06:58
58	PAG-20140503-C	3/05/2014	Conversation	Lewi Bajuli, his wife and Ida Ngato are talking about the traditional belief of Pagu people.	0:24:33
59	PAG-20140504-A	4/05/2014	Conversation	Lewi Parasaja is reporting to Ida Sangaji as the chief of Pagu community about the plan of the local government to build a 'satellite city' on the Pagu land.	0:12:57
60	PAG-20140504-B	4/05/2014	Conversation/ story telling	Aleksander Kalawe is telling a story to some audience about a prince who became a dog. Because of a good deed of a beautiful girl to the dog, he turned into a human form again who then married the girl.	0:05:50

No	Nama Rekaman	Tanggal Dibuat	Genre	Situation	Panjang Rekaman
61	PAG-20140504-C	4/05/2014	Conversation/ story telling	Aleksander Kalawe is telling a story to some audience about a woman who gave birth to a turtle and a monitor lizard.	0:09:05
62	PAG-20140504-D	4/05/2014	Conversation/ story telling	Aleksander Kalawe is telling the history of how Leleseng Village was established.	0:03:35
Total lamanya rekaman:					12:49:43